



# **EVALUASI RPJMD**

## **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2022**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii	
DAFTAR TABEL .....	iv	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 .....	10	
B. Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 .....	17	
C. Evaluasi dan Analisis Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 .....	20	
<b>MISI 1</b>	<b>Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya.....</b>	<b>21</b>
SASARAN 1:	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan.....	21
SASARAN 2:	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.....	26
SASARAN 3:	Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam Dan Aman.....	31
SASARAN 4:	Meningkatnya Pelayanan Dasar bagi Masyarakat.....	32
SASARAN 5:	Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Masyarakat.....	34
<b>MISI 2</b>	<b>Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal.....</b>	<b>36</b>
SASARAN 6:	Menurunnya Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah.....	36
SASARAN 7:	Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka.....	40
SASARAN 8:	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan .....	42
SASARAN 9:	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	46
SASARAN 10:	Meningkatnya Investasi PMDN.....	50
SASARAN 11:	Meningkatnya pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat .....	52
<b>MISI 3</b>	<b>Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang Menunjang Sektor Perekonomian.....</b>	<b>54</b>
SASARAN 12:	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas .....	54
<b>MISI 4</b>	<b>Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Dan Berwawasan Lingkungan.....</b>	<b>61</b>
SASARAN 13:	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat .....	61
SASARAN 14:	Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender dan	



Perlindungan Terhadap Anak.....	68
SASARAN 15: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	72
<b>MISI 5</b>	
<b>Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis .....</b>	<b>75</b>
SASARAN 16: Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik.....	75
SASARAN 17: Meningkatnya kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi	82
SASARAN 18: Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah ...	87
SASARAN 19: Meningkatnya kehidupan Sosial Keagamaan.....	93



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Dimensi IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022 .....	4
Tabel 1.2	PDRB Perkapita Kabupaten Kota ADHB (ribu rupiah).....	5
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2018–2022 .....	5
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Miskin Prov. Kalimantan Selatan .....	7
Tabel 1.5	Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2018-2022 .....	8
Tabel 1.6	Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota .....	9
Tabel 1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022.....	9
Tabel 1.8	Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan HLS Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022	23
Tabel 1.9	Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan RLS Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022	24
Tabel 1.10	Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan UHH Kabupaten/ Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022.....	27
Tabel 1.11	Persentase Penduduk Miskin Prov. Kalimantan Selatan .....	37
Tabel 1.12	Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2018-2022 .....	39
Tabel 1.13	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan...	39
Tabel 1.14	Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota .....	39
Tabel 1.15	Nilai IDM dan Status Perkembangan Desa .....	63
Tabel 1.16	Rekapitulasi Tingkat Perkembangan Desa .....	66
Tabel 1.17	Perkembangan Kategori Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022.....	66



## EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan ini merupakan Laporan Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Periode RPJMD 2018-2023 yang mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD, disertai perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target di RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ Indikator Kinerja

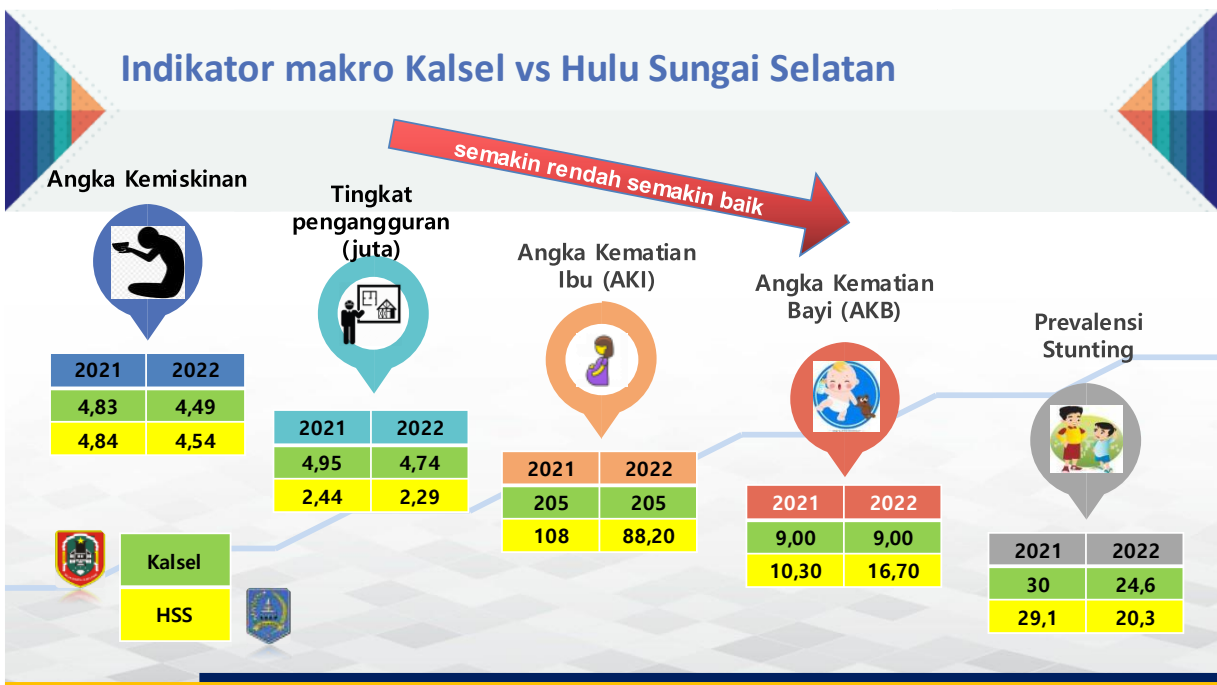
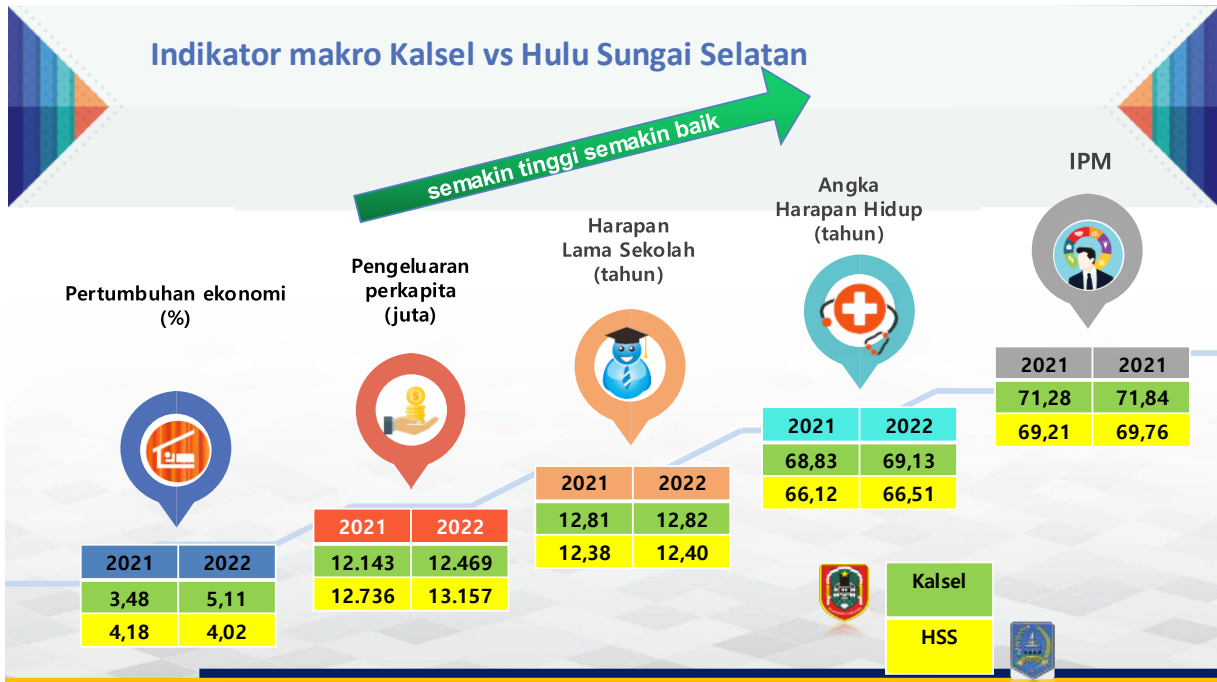
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

➤ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Berikut ini disampaikan tingkat capaian indikator kinerja sasaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 (Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis) sebagai berikut:

**CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN VS INDIKATOR MAKRO KALSEL TAHUN 2021-2022**



#### ➤ **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. Perkembangan IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan maupun penurunan besaran persen dari komponen pembentuk IPM, seperti umur harapan hidup, harapan sekolah, rata-rata lama sekolah atau pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Perubahan dari masing-masing komponen tersebut sangat ditentukan oleh berbagai faktor.



**Tabel 1.1 Dimensi IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Tahun 2018-2022**

Komponen Pembentuk IPM	Pemerintah	Tahun					Demensi
		2018	2019	2020	2021	2022	
Angka Harapan Hidup	Hulu Sungai Selatan	65,59	65,82	65,97	66,12	66,51	Kesehatan
	Kalimantan Selatan	68,23	68,49	68,66	68,83	69,13	
Harapan Lama Sekolah	Hulu Sungai Selatan	12,07	12,10	12,17	12,38	12,40	Pendidkan
	Kalimantan Selatan	12,50	12,52	12,68	12,81	12,82	
Rata-rata Lama Sekolah	Hulu Sungai Selatan	7,72	7,74	7,75	7,76	7,79	Pendidkan
	Kalimantan Selatan	8,00	8,20	8,29	8,34	8,46	
Pengeluaran Perkapita	Hulu Sungai Selatan	12.535	12.835	12.672	12.736	13.157	Ekonomi
	Kalimantan Selatan	12.062	12.253	12.032	12.143	12.469	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang disusun dengan menggunakan pendekatan model adaptasi dari *The United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menghitung *Human Development Index* (HDI).

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan.

#### ➤ **PENDAPATAN PERKAPITA**

PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami kenaikan yang relatif signifikan setiap tahunnya. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. PDRB perkapita merupakan





gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Data pada tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan PDRB Perkapita Kab/Kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2018-2022.

**Tabel 1.2 PDRB Perkapita Kabupaten Kota ADHB (ribu rupiah)**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	39.037	40.773	39.660	41.641	52.678
Kotabaru	67.899	71.138	73.776	78.135	99.693
Banjar	26.842	28.531	29.295	30.739	36.336
Barito Kuala	25.986	27.731	27.827	28.947	30.680
Tapin	42.310	44.550	44.420	47.170	65.614
Hulu Sungai Selatan	26.181	27.970	28.833	30.497	35.955
Hulu Sungai Tengah	24.423	26.218	27.294	28.332	30.213
Hulu Sungai Utara	19.496	21.112	21.953	22.961	24.522
Tabalong	69.055	72.057	70.293	74.951	111.622
Tanah Bumbu	54.239	53.929	61.949	66.056	92.690
Balangan	83.021	84.738	82.540	88.875	145.269
Banjarmasin	43.366	46.979	49.804	52.193	57.676
Banjarbaru	34.170	37.250	37.850	38.650	44.387

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kenaikan PDRB perkapita setiap tahunnya juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang juga tiap tahunnya meningkat.

➤ **LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI**

PDRB harga konstan atau rill dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun, tabel berikut menunjukkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022.

**Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2018–2022**

Kat	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i>	4,33	2,62	0,19	-0,01	-0,49
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i>	15,44	7,71	-6,20	13,35	6,52



Kat	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,57	4,36	-3,56	5,93	5,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>	7,08	4,33	4,46	4,52	7,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>	5,50	6,83	8,18	4,91	4,72
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,32	5,93	-3,48	6,14	5,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i>	5,18	5,09	-2,45	5,40	8,40
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i>	5,43	5,57	-2,61	4,56	5,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; food Service Activities</i>	6,50	8,06	-2,26	4,08	11,90
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i>	6,45	8,29	8,92	7,76	6,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>	2,65	3,82	1,13	1,61	-1,25
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,30	5,79	5,62	3,65	4,97
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Bussiness Activities</i>	4,22	4,91	-1,51	2,19	6,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>	3,77	5,49	-2,78	-1,72	0,14
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,01	5,33	0,17	0,23	1,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,13	8,61	9,86	6,73	7,56
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	6,97	7,11	-1,06	3,29	6,95
	<b>Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product</b>	<b>6,14</b>	<b>5,28</b>	<b>-1,19</b>	<b>4,19</b>	<b>4,02</b>

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

### ➤ **TINGKAT KEMISKINAN**

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan.

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik disetiap tahunnya. Seperti yang ditunjukkan pada data tabel dibawah ini.



**Tabel 1.4 Persentase Penduduk Miskin Prov. Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2018-2022**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	4,40	4,51	4,26	4,57	3,86
Kotabaru	4,52	4,49	4,22	4,86	4,30
Banjar	2,70	2,72	2,41	3,04	2,79
Barito Kuala	4,56	4,63	4,51	5,11	4,75
Tapin	3,70	3,41	3,06	3,60	3,60
Hulu Sungai Selatan	5,21	5,33	5,17	4,84	4,54
Hulu Sungai Tengah	6,01	5,93	5,64	6,18	5,92
Hulu Sungai Utara	6,38	6,50	6,14	6,83	6,49
Tabalong	5,95	6,01	5,98	6,27	5,87
Tanah Bumbu	4,88	4,85	4,60	4,82	4,26
Balangan	5,59	5,55	5,32	6,07	5,83
Banjarmasin	4,18	4,20	4,39	4,89	4,74
Banjarbaru	4,19	4,30	4,01	4,40	4,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*Family Based-Policy*), rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga miskin). Dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, yang bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar.

Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses mereka kepada permodalan, teknologi dan pasar, sehingga peningkatan pendapatan dapat lebih besar



lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW.

Selain itu implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut telah menunjukkan sisi manfaat pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada tabel berikut dapat diketahui perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 1.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2018-2022**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,21	5,33	5,17	4,84	4,54
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	0,71	0,72	0,51	0,45	0,49
3	Indeks Keparahannya Kemiskinan	Persen	0,18	0,15	0,09	0,06	0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

➤ **KETIMPANGAN PENDAPATAN (RATIO GINI)**

Peningkatan PDRB Perkapita serta Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu indikator peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat melalui indeks gini. Indeks gini merupakan salah satu ukuran pemerataan ekonomi atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang nilai indeksnya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Pada Tabel di bawah ini adalah capaian indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2022.



**Tabel 1.6 Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Gini Ratio (Indeks Gini)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	0,234	0,271	0,250	0,232	0,263
Kotabaru	0,337	0,335	0,287	0,306	0,331
Banjar	0,327	0,330	0,322	0,344	0,300
Barito Kuala	0,338	0,285	0,277	0,284	0,289
Tapin	0,281	0,268	0,274	0,289	0,291
Hulu Sungai Selatan	0,317	0,288	0,300	0,275	0,260
Hulu Sungai Tengah	0,320	0,288	0,285	0,331	0,228
Hulu Sungai Utara	0,325	0,327	0,319	0,378	0,301
Tabalong	0,305	0,306	0,346	0,288	0,337
Tanah Bumbu	0,332	0,346	0,300	0,281	0,292
Balangan	0,310	0,273	0,298	0,277	0,266
Banjarmasin	0,377	0,326	0,342	0,350	0,330
Banjarbaru	0,365	0,357	0,381	0,361	0,341

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

➤ **ANGKA PENGANGGURAN**

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022 seperti Tabel dibawah ini.

**Tabel 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022**

NO	KAB/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tanah Laut	3,42	3,41	3,57	3,52	4,17
2	Kotabaru	4,89	4,94	4,96	5,57	6,70
3	Banjar	2,90	2,89	3,87	3,98	2,72
4	Barito Kuala	2,99	2,51	2,91	3,22	3,63
5	Tapin	4,02	3,65	3,73	4,96	4,15
6	Hulu Sungai Selatan	2,33	2,43	2,24	2,44	2,29



NO	KAB/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				
		2018	2019	2020	2021	2022
7	Hulu Sungai Tengah	3,63	2,96	3,90	3,76	3,35
8	Hulu Sungai Utara	3,76	3,35	4,49	4,80	4,64
9	Tabalong	3,09	3,30	3,07	3,43	4,46
10	Tanah Bumbu	6,34	6,18	6,95	6,83	6,89
11	Balangan	2,34	2,33	2,46	2,44	3,98
12	Banjarmasin	8,25	7,69	8,32	8,47	6,96
13	Banjarbaru	5,11	4,93	5,54	5,70	5,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

#### **A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022**

Dari Hasil capaian pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022, 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang pencapaiannya  $\geq 100\%$  dan terdapat 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama yang pencapaiannya  $\leq 100\%$ .

Hasil capaian pengukuran terhadap 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM = (akar pangkat 3 dari (Indeks kesehatan x Indeks pendidikan x Indeks pengeluaran)) x 100  $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	69,21	69,76	97,08
		2. Harapan Lama Sekolah	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ I = Indeks HLS = Harapan Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum	12,38	12,40	93,30
		3. Rata-rata Lama Sekolah	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ I = Indeks RLS = Rata-Rata Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum	7,76	7,79	92,30
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	4. Angka Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. $\frac{\text{penjumlahan usia yang meninggal tahun itu}}{\text{jumlah orang yang meninggal tahun itu}} \times 100\%$	66,12	66,51	98,52
3	Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman	5. PPH Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan angka rata-rata jumlah jenis Bahan Makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita pertahun dalam kilogram serta per kapita per hari dalam satuan gram, pada kurun waktu tertentu.	86,33	87,54	100,42



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022
4	Meningkatnya Pelayanan Dasar bagi Masyarakat	6. Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	$\frac{\sum \text{Jumlah SPM yang terpenuhi}}{\sum \text{SPM perangkat daerah di Kab. HSS}} \times 100\%$	95,80	97,04	134,78
5	Menurunnya Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah	7. Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan)	4,84	4,54	100,00
		8. Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>Dimana :            Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i            Qi = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i            Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika :            G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah            0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang            G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	0,275	0,260	113,04
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\sum \text{Penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk angkatan kerja}} \times 100$	2,44	2,29	84,92
7	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	10. Laju Pertumbuhan Ekonomi	<p>Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang tertentu</p> $\frac{\text{PDRB}(t) - \text{PDRB}(t - 1)}{\text{PDRB}(t - 1)} \times 100\%$ <p>ket : t = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya tahun t</p>	4,19	4,02	63,01





No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022
		11. Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pengolahan tahun (N-1)}} \times 100\%$	5,93	5,25	94,42
		12. Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (tahun N)} - \sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun (N-1)}} \times 100\%$	5,40	8,40	146,85
		13. Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}} \times 100\%$	-0,01	-0,49	-9,96
8	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14. Persentase Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	S Retribusi dan Pajak Daerah Thn N	20,15	23,89	91,88
9	Meningkatnya investasi PMDN	15. Persentase Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	$\frac{\sum \text{nilai PMDN Tahun N} - \sum \text{nilai PMDN Tahun (N-1)}}{\sum \text{nilai PMDN Tahun (N-1)}} \times 100\%$	10,32	8,36	139,33
10	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan bagi Masyarakat	16. Tingkat Pengeluaran Wisatawan ( <i>Spending of Money</i> )	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah pengeluaran wisatawan untuk konsumsi akhir dan transfer sosial bekerjasama dengan dinas / instansi / <i>stakeholders</i> terkait dan perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Kab. HSS	Rp. 5.774.448 .000	Rp. 14.705.42 5.000	186,78



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022	
11	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	17. Persentase Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas}}{\text{Total infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang dibutuhkan}} \times 100\%$	58,74	64,74	126,18	
		18. Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan $\geq 40$ Km/jam	$\frac{\sum \text{Panjang jalan kondisi mantap}}{\text{total jumlah panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	68,37	69,58	105,75	
		19. Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	$\frac{\sum \text{ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{ketersediaan air irigasi seluruh hektar}} \times 100\%$	68,49	70,47	101,99	
		20. Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Publik	$\frac{\sum \text{Sarana dan prasarana publik yang terbangun}}{\sum \text{sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	66,67	85,71	99,67	
		21. Persentase Kecukupan RTH Publik	$\frac{\sum \text{RTH publik yang terbangun}}{\sum \text{RTH publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	37,89	38,06	153,04	
		22. Persentase perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas x 100%	52,29	59,88	79,97	
12	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	23. Indeks Desa Membangun (IDM)	$\text{IDM} = \frac{\sum \text{IDM se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$	$\frac{\sum \text{IDM se Kab.HSS}}{\text{Desa se Kab.HSS}} : \text{Jumlah IDM}$	0,70	0,73	105,13



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022
13	Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender dan Perlindungan terhadap Anak	24. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>IPG :</p> <p>1) Umur panjang dan sehat:</p> <p>1. indikator angka harapan hidup perempuan</p> <p>2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan</p> <p>3. indeks sebaran merata : indeks / harapan hidup dengan sebaran merata</p> <p>2) Pengetahuan:</p> <p>1. indikator AMH perempuan, MYS perempuan</p> <p>2. Indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan</p> <p>3. Indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata</p> <p>3) Kehidupan yang layak :</p> <p>1. Indikator perkiraan pendapatan perempuan</p> <p>2. Indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan</p> <p>3. Indeks sebaran merata : indeks dengan pendapatan sebaran merata</p>	89,65	89,65	98,61
		25. Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan layak anak}}{\text{Jumlah desa/kelurahan yang ada}} \times 100$			
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	26. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>IKLH dibentuk oleh komponen IKU + IKA + IKTL</p> <p>* IKU = Indeks Kualitas Udara</p> <p>* IKA = Indeks Kualitas Air</p> <p>* IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>	67,57	69,23	124,51
15	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik	27. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	66,81 (B)	70,45 (B)	84,88



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022
		28. Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	A (80,02)	A (81,50)	101,75
		29. Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.	A- (4,19)	A (4,54)	100,67
16	Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi	30. Opini WTP BPK terhadap LKPD	Hasil Audit BPK RI yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah, penyajian laporan keuangan, meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, penguatan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	WTP	WTP	100
		31. Indeks profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu cara mengukur profesionalisme ASN. Pengukuran dihitung dari data-data : SAPK, E-PUPNS, Sistem Informasi Kepegawaian, Daftar Gaji dan Tunjangan ASN, sasaran kerja pegawai dan pegawai yang terkena hukuman.	55,34	59,75	76,48
17	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	32. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Teknologi Informasi dengan baik	$\frac{\sum \text{Perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik}}{\sum \text{Perangkat daerah Se - Kab. HSS}} \times 100\%$	65,79	92,30	100,21
		33. Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	$\frac{\sum \text{Desa yang menggunakan aplikasi TI}}{\sum \text{Desa Se - Kab. HSS}} \times 100\%$	23,61	31,25	100



## B. PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022

Hasil Pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 5 (lima) Tujuan, 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dan 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan bahwa dari 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis, 16 (enam belas) Sasaran Strategis dikategorikan dengan capaian kinerja **sangat baik/tinggi** dengan rata-rata capaian pada interval  $91\% \leq 100\%$ , sedangkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dikategorikan **baik/tinggi** dengan rata-rata capaian pada interval  $76\% \leq 90\%$ .

Dan dari 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran masuk dalam kategori **sangat baik/tinggi** dengan capaian kinerja berada pada interval  $91\% \leq 100\%$ , 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran yang capaian kinerjanya berada pada interval  $76\% \leq 90\%$  masuk dalam kategori **baik/tinggi**, dan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang berkategori **sangat rendah** dengan capaian  $\leq 50\%$ .

Capaian indikator kinerja tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengungkapan capaian kinerja sasaran dilakukan secara berurutan seperti urutan pada RPJMD dan RKPD, yaitu mulai dari misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas. Rincian capaian misi, tujuan, sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dirincikan pada tabel sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1 Harapan lama sekolah	13,29	12,40	93,30
			2 Rata-rata lama sekolah	8,44	7,79	92,30
			3 Persentase PAUD formal terakreditasi A	9,37	1,88	20,01
			4 Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	13,19	13,98	105,98
		2 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5 Angka Harapan Hidup	67,51	66,51	98,52
			6 Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia $\leq 20$ tahun	70,51	70,92	99,42



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
				7	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA (97,51)	AA (87,40)	91,99
				8	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	13,04	11,54	88,49
		3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	9	PPH Ketersediaan	87,17	87,54	100,42
		4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	10	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	72,00	97,04	134,78
		5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11	Persentase angka PMKS yang mandiri	73,65	56,77	77,08

Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	12	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4,54	4,54	100
				13	Indeks Gini	0,299	0,260	113,04
		7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14	Tingkat pengangguran terbuka	1,99	2,29	84,92
		8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	15	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	5,56	5,25	94,42
				16	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,72	8,40	146,85
				17	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,92	-0,49	-9,96
				18	Persentase koperasi sehat	4,46	18,40	412,67
		9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	26 milyar	23,89 milyar	91,88
		10	Meningkatnya investasi PMDN	20	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	6,00	8,36	139,33
				11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	21	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	RP. 7.873.326.000



Misi III : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA	
3	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	12 Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	22	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan $\geq 40$ Km/jam	65,80	69,58	105,75
			23	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	69,10	70,47	101,99
			24	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	86,00	85,71	99,67
			25	Persentase kecukupan RTH publik	24,87	38,06	153,04
			26	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	74,88	59,88	79,97

Misi IV : Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA	
4	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	13 Meningkatkan kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,69	0,73	105,13
			28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,91	89,65	98,61
		14 Meningkatkan pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	29	Persentase desa/ kelurahan layak anak	6,08	6,08	100,00
			15 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	30	Indeks kualitas lingkungan hidup	55,60	69,23

Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA	
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	16 Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	31	Predikat AKIP	A (80,10)	A (81,50)	101,75
			32	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)	A (4,54)	100,67



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA		
		17	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	33	Kualitas aspek perencanaan	65,45	95,00	145,15
			34	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100	
			35	Indeks profesionalisme ASN	78,12	59,75	76,48	
		18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	92,11	92,30	100,21
				37	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	31,25	31,25	100
		19	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	38	Persentase peningkatan penerimaan zakat	11,00	12,24	111,27

### C. EVALUASI DAN ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022

Berikut adalah analisis atas Pengukuran secara mandiri (*self assessment*) hasil pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 5 (lima) Tujuan, 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dan 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan bahwa dari 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis, 16 (enam belas) Sasaran Strategis dikategorikan dengan capaian kinerja **sangat baik/tinggi** dengan rata-rata capaian pada interval  $91\% \leq 100\%$ , sedangkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dikategorikan **baik/tinggi** dengan rata-rata capaian pada interval  $76\% \leq 90\%$ .

Dan dari 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, sebanyak 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran masuk dalam kategori **sangat baik/tinggi** dengan capaian kinerja berada pada interval  $91\% \leq 100\%$ , 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran yang capaian kinerjanya berada pada interval  $76\% \leq 90\%$  masuk dalam kategori **baik/tinggi**, dan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang berkategori **sangat rendah** dengan capaian  $\leq 50\%$ . Ulasan capaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2022 sebagai berikut.





<b>MISI</b> <b>1</b>	<b>MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA</b>
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

<b>TUJUAN</b> <b>I</b>	<b>MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN DASAR LAINNYA</b>
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Capaian Tujuan Pertama pada Misi Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya yakni **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya.”**

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 5 (lima) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>SASARAN 1: MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN.</b>
-------------------------------------------------------------------------

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 pada **Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Harapan lama sekolah	13,29	12,40	93,30
Rata-rata lama sekolah	8,44	7,79	92,30
Persentase PAUD formal terakreditasi A	9,37	1,88	20,01
Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	13,19	13,98	105,98
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>77,90</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan adalah **baik/tinggi** dengan rata-rata capaian 77,90%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Harapan lama sekolah	12,07	12,10	12,17	12,38	12,40	13,29	13,52
Rata-rata lama sekolah	7,72	7,74	7,75	7,76	7,79	8,44	8,53
Persentase PAUD formal terakreditasi A	1,25	1,25	3,75	1,25	1,88	9,37	12,50
Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	4,76	6,88	13,21	12,90	13,98	13,19	15,02

Adapun perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dengan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

KAB.HSS Vs PROV.KALSEL	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Harapan lama sekolah	12,07	12,10	12,17	12,38	12,40
Provinsi Kalimantan Selatan		12,50	12,52	12,68	12,81	12,82
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rata-rata lama sekolah	7,72	7,74	7,75	7,76	7,79
Provinsi Kalimantan Selatan		8,00	8,20	8,29	8,34	8,46
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase PAUD formal terakreditasi A	1,25	1,25	1,25	1,25	1,88
Provinsi Kalimantan Selatan		NA	NA	NA	NA	NA
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	4,76	6,88	13,21	12,90	13,98
Provinsi Kalimantan Selatan		NA	NA	NA	NA	NA

#### Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

##### HARAPAN LAMA SEKOLAH

Secara umum pencapaian HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami peningkatan namun masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2022 nilai HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 12,40 tahun, ini mengandung arti bahwa penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai harapan untuk bersekolah hingga 12,40 tahun lamanya atau bersekolah mencapai kelas tiga SLTA.



Pertumbuhan HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021-2022 sebesar 0,16 persen dengan kenaikan HLS sebesar 0,02 tahun. Pertumbuhan HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2021-2022 merupakan angka pertumbuhan tertinggi ke 6 dan berada di atas pertumbuhan HLS Provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan ini lebih besar dibandingkan tahun 2021 namun perlu ditingkatkan lagi program di bidang pendidikan agar ke depan pertumbuhan HLS bisa lebih tinggi. Dan perlu kita ketahui bahwa angka HLS ini ada kaitannya dengan tingginya penduduk yang menikah usia dini dan putus sekolah.

**Tabel 1.8 Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan HLS Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022**

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan HLS	Kenaikan Angka HLS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah Laut	0,08	0,01
2	Kotabaru	0,92	0,11
3	Banjar	2,28	0,29
4	Barito Kuala	1,13	0,14
5	Tapin	0,75	0,09
6	Hulu Sungai Selatan	0,16	0,02
7	Hulu Sungai Tengah	0,08	0,01
8	Hulu Sungai Utara	0,08	0,01
9	Tabalong	0,08	0,01
10	Tanah Bumbu	0,08	0,01
11	Balangan	1,12	0,14
12	Kota Banjarmasin	0,07	0,01
13	Kota Banjar Baru	0,07	0,01
Kalimantan Selatan		0,08	0,01

Sumber: BPS Kab.Hulu Sungai Selatan

### **RATA-RATA LAMA SEKOLAH**

Secara umum pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Dari tahun 2018 meski perlahan tapi pasti mulai menunjukkan peningkatan namun masih belum beranjak dari kisaran angka tujuh tahun dimana tahun 2022 RLS sebesar 7,79 tahun yang artinya secara rata rata lamanya sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya sekitar tujuh tahun atau hingga kelas satu SLTP. Terkait dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan angka rata-rata lama sekolah berada pada kisaran tujuh tahun menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas penduduk yang bekerja di Kabupaten Hulu Sungai masih rendah dilihat dari tingkat pendidikannya.

Pertumbuhan RLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021-2022 sebesar 0,39 persen dengan kenaikan RLS sebesar 0,03 tahun. Pertumbuhan



RLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2021-2022 berada pada angka pertumbuhan 7 kabupaten/kota terendah pertumbuhan RLSnya bersama Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kota Banjarbaru serta berada dibawah pertumbuhan RLS Provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan ini cukup kecil, sehingga diharapkan tahun yang akan datang pertumbuhan RLS bisa meningkat melebihi tahun 2021 dan beberapa tahun kedepan RLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan bisa sejajar atau di atas RLS Provinsi Kalimantan Selatan. Angka rata-rata lama sekolah erat kaitan dengan bidang ketenagakerjaan, karena penduduk yang dicakup adalah penduduk usia 25 tahun ke atas yang sebagian besar sudah menyelesaikan pendidikan formalnya hingga jenjang sarjana. Semakin banyak penyediaan lapangan pekerjaan untuk penduduk yang minimal sudah menyelesaikan pendidikan dasar atau bahkan pendidikan sarjana, maka akan meningkatkan rata-rata lama sekolah.

**Tabel 1.9 Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan RLS Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022**

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan RLS	Kenaikan Angka RLS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah Laut	0,13	0,01
2	Kotabaru	0,13	0,01
3	Banjar	2,53	0,19
4	Barito Kuala	1,06	0,08
5	Tapin	2,32	0,18
6	Hulu Sungai Selatan	0,39	0,03
7	Hulu Sungai Tengah	3,37	0,27
8	Hulu Sungai Utara	0,13	0,01
9	Tabalong	0,11	0,01
10	Tanah Bumbu	3,51	0,28
11	Balangan	2,08	0,16
12	Kota Banjarmasin	0,10	0,01
13	Kota Banjar Baru	0,18	0,02
Kalimantan Selatan		1,44	0,12

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

#### **PERSENTASE PAUD FORMAL TERAKREDITASI A**

Pada tahun 2022 Persentase PAUD Formal Terakreditasi A meningkat menjadi 1,88% dari sebelumnya 1,25%, capaian ini masih tergolong rendah dikarenakan sampai tahun 2022 hanya terdapat penambahan 1 sekolah yang terakreditasi A pada Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN TERAKREDITASI A**



Pada tahun 2022 Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A mengalami peningkatan dari sebelumnya 12,90% pada tahun 2021 menjadi 13,98% pada tahun 2022, capaian ini melebihi target 2022 yaitu 13,19%.

Dalam pencapaian indikator sasaran strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,67	66,80	62.637.310.615	59.595.839.578	95,14
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,58	63,20			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100	104,06	104,06			
	APM SD	90	99,74	110,82			
	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,68	67,20			
	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,58	63,20			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100	88,74	88,74			
	APM SMP	90	74,67	82,97			
	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi B	50	37,33	74,66			
	Persentase Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	52	53	101,92			
	Rasio pengawas dan penilik PAUD	5:7	1:15	24,43			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	91	103	113,19			
	Angka Partisipasi Pend. Non Formal	85	100	117,65			



**SASARAN 2: MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN.**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada **Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	67,51	66,51	98,52
Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	70,51	70,92	99,42
Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA (97,51)	AA (87,40)	91,99
Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	13,04	11,54	88,49
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>94,60</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan adalah sangat baik/tinggi atau tercapai 94,60%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Angka Harapan Hidup	65,59	65,82	65,97	66,12	66,51	67,51	67,87
Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	75,81	72,90	70,54	70,92	70,92	70,51	69,68
Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	NA	BB	AA (83,60)	AA (80,75)	AA (87,40)	AA (97,51)	AAA
Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	NA	4,35	0	0	11,54	13,04	17,39

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**



## ANGKA HARAPAN HIDUP

Selama kurun waktu 2018-2022, rata-rata umur harapan hidup penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dibawah rata-rata umur harapan hidup penduduk Kalimantan Selatan. Pada tahun 2022 ini peningkatan umur harapan hidup yaitu sebesar 0,39 tahun, peningkatan tersebut lebih besar kenaikannya dibandingkan peningkatan ditahun 2021 yaitu sebesar 0,15 tahun. Pada tahun 2022 umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat 66,51 tahun yang berarti bayi yang baru lahir pada tahun 2022 diharapkan dapat mencapai umur 66,51 tahun untuk hidup atau umur yang mungkin dicapai bayi dari sejak dilahirkan pada tahun 2022 sampai meninggal dunia mencapai usia 66,51 tahun. Jadi selama kurun waktu 5 tahun (2018-2022), pada tahun 2022 umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meningkat sekitar 0,92 tahun atau lebih panjang sekitar 7 bulan 19 hari dibanding tahun 2018.

Pertumbuhan UHH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021-2022 sebesar 0,59 persen dengan kenaikan UHH sebesar 0,39 tahun. Pertumbuhan UHH Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2021-2022 mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan berada pada urutan ke 2 tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan dan pertumbuhan UHHnya diatas pertumbuhan Provinsi Kalimantan. Jika dilihat laju pertumbuhan UHH tahun sebelumnya Peningkatan pertumbuhan UHH tahun 2022 lebih tinggi dengan kenaikan 0,39 tahun. Kenaikan UHH Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 di dukung dengan berjalannya program Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 1.10 Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan UHH Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022**

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan UHH	Kenaikan UHH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah Laut	0,39	0,27
2	Kotabaru	0,35	0,24
3	Banjar	0,47	0,32
4	Barito Kuala	0,42	0,28
5	Tapin	0,44	0,31
6	Hulu Sungai Selatan	0,59	0,39
7	Hulu Sungai Tengah	0,51	0,34
8	Hulu Sungai Utara	0,67	0,43
9	Tabalong	0,38	0,27
10	Tanah Bumbu	0,35	0,25
11	Balangan	0,41	0,28



No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan UHH	Kenaikan UHH
12	Kota Banjarmasin	0,42	0,30
13	Kota Banjar Baru	0,36	0,26
Kalimantan Selatan		0,44	0,30

Sumber : BPS Kab. HSS

### **PERSENTASE WANITA PERNAH KAWIN USIA (15-49) TAHUN MENURUT USIA KAWIN PERTAMA; USIA <= 20 TAHUN**

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perempuan yang umur kawin pertamanya 20 tahun kebawah pada tahun 2021, sebesar 70,92 persen angka ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 70,54 persen. Sedangkan wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas yang merupakan usia ideal menikah turun menjadi 29,08 persen dari sebelumnya hanya 29,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama usia di atas 20 tahun.

Usia yang paling ideal untuk hamil dan melahirkan adalah usia 21-35 tahun jika dilihat perkembangan kematangan, wanita pada kelompok umur ini telah memiliki kematangan reproduksi, emosional maupun aspek sosial. Pada kehamilan di usia muda (termasuk usia remaja di bawah 20 tahun) memiliki resiko yang lebih tinggi pada kesehatan. Pada usia di bawah 20 tahun secara ilmu kedokteran memiliki organ reproduksi yang belum siap dan beresiko tinggi mengalami kondisi kesehatan yang buruk saat hamil. Selain itu kondisi sel telur belum sempurna dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan janin. Beberapa kondisi kesehatan yang mungkin terjadi adalah tekanan darah tinggi pada ibu hamil, kelahiran premature yaitu kelahiran di bawah 37 minggu. Hal yang paling dikhawatirkan adalah kematian ibu dan bayi yang tinggi dikarenakan terjadinya pendarahan dan infeksi. Selain hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun yang mempunyai resiko yang lebih tinggi pada kesehatan, hamil dan melahirkan pada usia diatas 35 tahun juga beresiko lebih tinggi pada kesehatan.

### **TINGKAT KESEHATAN RUMAH SAKIT (RS)**

Pada indikator kinerja sasaran Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS) dari target berpredikat AAA dengan nilai 97,51, terealisasi Berpredikat AA dengan nilai sebesar 87,40, yang berarti Tercapai sebesar 91,99%.

Adapun adanya indikator kinerja sasaran Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS) adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD.





Target kinerja/kesehatan rumah sakit adalah hasil penjumlahan nilai riil ke 3 aspek. Kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Sehat
  - AAA jika total skor > 95
  - AA jika total skor  $\geq$  80-95
  - A jika total nilai > 65-80
2. Kurang Sehat
  - BBB jika total skor > 50-65
  - BB jika total skor > 40-50
  - B jika total skor > 30-40
3. Tidak Sehat
  - CCC jika total skor > 20-30
  - CC jika total skor > 10-20
  - C jika total skor < 10

Tingkat kesehatan rumah sakit di ukur berdasarkan 3 aspek penilaian yakni:

- 1) Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%; terdiri dari 7 indikator;
- 2) Indikator kinerja pelayanan, dengan bobot 40%; terdiri dari 26 indikator;
- 3) Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%; terdiri dari 18 indikator.

Hasil survey dan perhitungan memberikan hasil berikut :

- 1) Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%, mendapatkan nilai 17,18 dari total nilai 20;
- 2) Indikator kinerja pelayanan, dengan bobot 40%, mendapatkan nilai 23,39 dari total nilai 40; dan
- 3) Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%, mendapatkan nilai 36,56 dari total nilai 40.

Rata-rata nilai untuk tingkat kesehatan rumah sakit tahun 2022 adalah 87,40 dengan predikat AA. Capaian ini belum memenuhi target dan terjadi peningkatan dibandingkan capaian tahun 2021 yang mencapai nilai 87,19.

## **PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI PARIPURNA**

Pada tahun 2022 terdapat 3 fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan capaian 11,54%.

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan didukung oleh program sebagai berikut:



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Kelahiran di Faskes	100	98,45	98,45	81.362.533.390	76.097.156.052	93,53
	Persentase Penurunan Komplikasi obstetri	18	23,11	71,60			
	% Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	100	100	100			
	% Pelayanan bayi	100	86,36	105,32			
	%Cakupan desa UCI	80	95,45	119,31			
	% Imunisasi dasar lengkap pada bayi	85	94,60	111,29			
	% Penurunan Balita gizi kurang	8	5	137,50			
	% BBLR	11	7,71	129,90			
	% Penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM	100	94,37	94,37			
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	% Penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM	100	94,37	94,37	9.331.261.875	6.918.111.738	74,14
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	% Penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM	100	94,37	94,37	15.184.900	13.820.500	91,01
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	% Penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM	100	94,37	94,37	360.027.400	321.869.150	89,40
5. Program Pengendalian Penduduk	Persentase kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang telah dibentuk	29,73	100	336,36	1.255.708.800	1.231.130.536	98,04
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,97	7,12	111,94	1.959.930.275	1.933.284.350	98,64
7. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	71,43	71,43	100	1.850.355.100	1.473.362.173	79,63
8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentase indikator mutu pelayanan yang tercapai sesuai standar	92	97,71	106,21	184.681.555.935	149.578.546.050	80,99



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tingkat pemenuhan kapasitas sumber daya manusia yang sesuai standar	100	85,99	85,99	448.800.000	277.360.000	61,80

**SASARAN 3: TERCUKUPINYA KETERSEDIAAN PANGAN YANG BERAGAM DAN AMAN.**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 pada **Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
PPH Ketersediaan	87,17	87,54	100,42
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>100,42</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Tercukupinya Ketersediaan Pangan Yang Beragam Dan Aman adalah **sangat baik/tinggi** dengan rata-rata capaian lebih dari 100%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
PPH Ketersediaan	83,19	83,95	85,48	86,33	87,54	87,17	88,04

Dalam pencapaian sasaran strategis Tercukupinya Ketersediaan Pangan Yang Beragam Dan Aman didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Sumber Daya	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	112	112	100	2.175.000.000	2.174.574.000	99,98



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Skor PPH Ketersediaan	87,17	87,54	100,42			
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	82,37	100	121,40	2.081.727.550	1.898.712.444	91,21
	Persentase rumah tangga pengonsumsi pangan B2SA	76,06	76,06	100			
	Nilai Tukar Petani	107	107	100			
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan keamanan	100	100	100	30.389.900	30.194.900	99,36

**SASARAN 4: MENINGKATNYA PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT.**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4 pada **Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Persentase Capaian Perangkat Daerah Dalam Menerapkan SPM	72	97,04	134,78
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>134,78</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat adalah **sangat baik/tinggi** dengan rata-rata capaian 134,78%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Persentase Capaian Perangkat Daerah Dalam Menerapkan SPM	52,00	57,00	57,00	95,80	97,04	72,00	75,00



Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)				
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,67	66,80	62.637.310.615	59.595.839.578	95,14				
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,58	63,20							
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100	104,06	104,06							
	APM SD	90	99,74	110,82							
	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,68	67,20							
	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,58	63,20							
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100	88,74	88,74							
	APM SMP	90	74,67	82,97							
	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi B	50	37,33	74,66							
	Persentase Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	52	53	101,92							
	Rasio pengawas dan penilik PAUD	5:7	1:15	24,43							
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	91	103	113,19							
	Angka Partisipasi Pend. Non Formal	85	100	117,65							
	2. Program Pemenuhan Upayan kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Kelahiran di Faskes	100	98,45				98,45	81.362.533.390	76.097.156.052	93,53
		Persentase Penurunan Komplikasi obstetri	18	23,11				71,60			
% Cakupan Pelayanan Ibu Nifas		100	100	100							
% Pelayanan bayi		100	86,36	105,32							



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	%Cakupan desa UCI	80	95,45	119,31			
	% Imunisasi dasar lengkap pada bayi	85	94,60	111,29			
	% Penurunan Balita gizi kurang	8	5	137,50			
	% BBLR	11	7,71	129,90			
	% Penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM	100	94,37	94,37			
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rasio Rumah Tangga yang memiliki akses sarana air bersih layak	0,96	0,95	98,54	11.917.191.036	11.863.659.705	99,55
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Rumah Tangga yang memiliki akses sarana sanitasi layak	0,87	0,85	97,70	11.008.749.000	10.973.683.040	99,68

**SASARAN 5: MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN MASYARAKAT.**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 pada **Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Persentase angka PMKS yang mandiri	73,65	56,77	77,08
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>77,08</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Perlindungan Sosial Dan Masyarakat adalah **baik/tinggi** dengan rata-rata capaian 77,08%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Persentase angka PMKS yang mandiri	54,97	61,40	55,93	54,09	56,77	73,65	67,20

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Sosial Dan Masyarakat didukung oleh program sebagai berikut:

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan	100	96,19	96,19	7.553.729.700	6.158.242.200	81,53
	Persentase penerima bantuan Rehabilitasi sosial tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran	100	84,25	84,25			
	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang memiliki keterampilan	100	100	100			



<b>MISI</b> <b>2</b>	<b>MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN KEARIFAN LOKAL</b>
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

<b>TUJUAN</b> <b>II</b>	<b>MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF YANG BERDAMPAK TERHADAP ANGKA KEMISKINAN</b>
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capaian Tujuan Pertama pada Misi Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal yakni **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan.”**

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 6 (enam) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN 6: MENURUNNYA KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4,54	4,54	100
Indeks Gini	0,299	0,260	113,04
<b>Rata-rata</b>			<b>106,52</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Kemiskinan Dan Kesenjangan Antar Wilayah adalah Sangat Baik/Tinggi atau tercapai 106,52%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :





INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	5,21	5,33	5,17	4,84	4,54	4,54	4,28
Indeks Gini	0,317	0,288	0,300	0,275	0,260	0,299	0,284

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4,54	4,54	100

Pada indikator kinerja sasaran Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dari target 4,54, terealisasi 4,54 yang berarti Tercapai sebesar 100% dengan kategori **sangat baik/tinggi**.

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan.

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik disetiap tahunnya Seperti yang ditunjukkan pada data tabel dibawah ini.

**Tabel 1.11 Persentase Penduduk Miskin Prov. Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2018-2022**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	4,40	4,51	4,26	4,57	3,86
Kotabaru	4,52	4,49	4,22	4,86	4,30
Banjar	2,70	2,72	2,41	3,04	2,79
Barito Kuala	4,56	4,63	4,51	5,11	4,75
Tapin	3,70	3,41	3,06	3,60	3,60
Hulu Sungai Selatan	5,21	5,33	5,17	4,84	4,54
Hulu Sungai Tengah	6,01	5,93	5,64	6,18	5,92



Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hulu Sungai Utara	6,38	6,50	6,14	6,83	6,49
Tabalong	5,95	6,01	5,98	6,27	5,87
Tanah Bumbu	4,88	4,85	4,60	4,82	4,26
Balangan	5,59	5,55	5,32	6,07	5,83
Banjarmasin	4,18	4,20	4,39	4,89	4,74
Banjarbaru	4,19	4,30	4,01	4,40	4,17

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, 2022

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*Family Based-Policy*), rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga miskin). Dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, yang bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar.

Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses mereka kepada permodalan, teknologi dan pasar, sehingga peningkatan pendapatan dapat lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW.

Selain itu implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut telah menunjukkan sisi manfaat pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Pada tabel berikut dapat diketahui perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 1.12 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2018-2022**

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,21	5,33	5,17	4,84	4,54
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	0,71	0,72	0,51	0,45	0,49
3	Indeks Keparahannya Kemiskinan	Persen	0,18	0,15	0,09	0,06	0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**Tabel 1.13 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Kabupaten	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Hulu Sungai Selatan	12.224 jiwa	12.636 jiwa	12.385 jiwa	11.466 jiwa	10,804 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Indeks Gini	0,299	0,260	113,04

Pada indikator kinerja sasaran Indeks Gini dari target 0,299, terealisasi 0,260 yang berarti Tercapai sebesar 113,04%.

Indeks gini merupakan salah satu ukuran pemerataan ekonomi atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang nilai indeksnya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Pada Tabel di bawah ini adalah capaian indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2022.

**Tabel 1.14 Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Gini Ratio (Indeks Gini)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	0,234	0,271	0,250	0,232	0,263
Kotabaru	0,337	0,335	0,287	0,306	0,331
Banjar	0,327	0,330	0,322	0,344	0,300



Kabupaten/Kota	Gini Ratio (Indeks Gini)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Barito Kuala	0,338	0,285	0,277	0,284	0,289
Tapin	0,281	0,268	0,274	0,289	0,291
<b>Hulu Sungai Selatan</b>	<b>0,317</b>	<b>0,288</b>	<b>0,300</b>	<b>0,275</b>	<b>0,260</b>
Hulu Sungai Tengah	0,320	0,288	0,285	0,331	0,228
Hulu Sungai Utara	0,325	0,327	0,319	0,378	0,301
Tabalong	0,305	0,306	0,346	0,288	0,337
Tanah Bumbu	0,332	0,346	0,300	0,281	0,292
Balangan	0,310	0,273	0,298	0,277	0,266
Banjarmasin	0,377	0,326	0,342	0,350	0,330
Banjarbaru	0,365	0,357	0,381	0,361	0,341

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah didukung oleh program sebagai berikut:

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pemberdayaan Sosial	Persentase MBR yang Usahanya Meningkatkan	100	90,18	90,18	4.925.289.150	4.792.701.163	97,31
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan	100	92,43	92,43			
2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penerima bantuan beras sejahtera daerah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah	100	100	100	13.688.146.400	13.264.250.800	96,90
	Persentase penerima bantuan rumah sejahtera pada masyarakat berpenghasilan rendah	100	84,46	84,46			
	Persentase penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan PKH tepan sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah	100	98,21	98,21			
3. Program Penanganan Bencana	Persentase Keaktifan Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana	100	100	100	508.120.000	460.786.000	90,68

**SASARAN 7: MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA**



Capaian kinerja Sasaran Strategis 7 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Tingkat pengangguran terbuka	1,99	2,29	84,92
<b>Rata-rata</b>			<b>84,92</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Baik/Tinggi atau tercapai 84,92%.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Tingkat pengangguran terbuka	2,43	2,56	2,24	2,44	2,29	1,99	1,86

Adapun perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tingkat pengangguran terbuka dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

NO	KAB/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanah Laut	3,42	3,41	3,57	3,52	4,17
2	Kotabaru	4,89	4,94	4,96	5,57	6,70
3	Banjar	3,03	3,01	3,87	3,98	2,72
4	Barito Kuala	2,99	2,51	2,93	3,22	3,63
5	Tapin	4,22	3,80	3,73	4,96	4,15
6	Hulu Sungai Selatan	2,33	2,43	2,24	2,44	2,29
7	Hulu Sungai Tengah	3,63	2,96	3,90	3,76	3,35
8	Hulu Sungai Utara	3,91	3,48	4,49	4,8	4,64
9	Tabalong	3,09	3,30	3,07	3,43	4,46



NO	KAB/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				
		2018	2019	2020	2021	2022
10	Tanah Bumbu	6,34	6,18	6,95	6,83	6,89
11	Balangan	2,34	2,33	2,46	2,44	3,98
12	Banjarmasin	8,25	7,69	8,32	8,47	6,96
13	Banjarbaru	5,20	5,06	5,54	5,70	5,47

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat pengangguran terbuka didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja bersertifikat kompetensi	37,40	37,40	100	262.019.700	246.483.060	94,07
2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio lowongan (posisi) kerja per X ribu angkatan kerja	37,40	37,40	100	30.235.100	29.084.850	96,20
3. Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	100	100	100	34.319.750	22.033.000	64,20

**SASARAN 8: MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 8 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	5,56	5,25	94,42
Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,72	8,40	146,85
Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,92	-0,49	-9,96
Persentase koperasi sehat	4,46	18,40	412,67
<b>Rata-rata</b>			<b>161,00</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan adalah **Sangat Baik/Tinggi** atau tercapai 161,00%.



Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	4,55	4,36	-3,56	5,93	5,25	5,56	5,85
Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,84	5,09	-2,45	5,40	8,40	5,72	5,83
Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,33	2,62	0,19	-0,01	-0,49	4,92	4,92
Persentase koperasi sehat	1,18	3,09	6,17	12,35	18,40	4,46	5,10

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan didukung oleh program sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Sasaran: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan**

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan bahan baku lokal yang terpakai di industri pengolahan	21,42	33,39	155,88	1.690.212.120	1.342.093.137	79,40
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Produk Industri Pengolahan Pangan Yang Bersertifikasi Mutu	21,42	21,42	100	32.475.925	0	0

**Indikator Kinerja Sasaran: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase komoditas barang beredar yang sesuai standar	85,71	85,71	100	29.791.000	20.223.350	67,88
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	100	100	100	6.090.894.200	5.850.212.546	96,05



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Persentase penerimaan retribusi	90	70	77,78			
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga antar waktu	11	10	90,90	546.629.100	371.964.332	68,05
4. Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pedagang yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Online	13	13	100	630.925.000	539.683.286	85,54
	Persentase Promosi Dagang melalui Pameran	100	100	100			
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	71	62	87,32	39.165.950	33.395.500	85,27
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kerjasama antar wilayah yang dilaksanakan	2	0	0	15.368.000	9.700.000	63,12

Indikator Kinerja Sasaran: Laju pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana produksi tanaman pangan yang berkualitas	23	17,5	76,09	1.736.905.650	1.644.973.775	94,71
	Persentase penyediaan sarana produksi hortikultura yang berkualitas	22	15,82	71,91			
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas lahan sawah yang terairi dengan sistem irigasi teknis	63,41	64,50	101,72	9.854.734.250	8.499.500.669	86,25





Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase rasio pakan ternak dengan kebutuhan	100	100	100	336.126.950	318.755.500	94,83
	Persentase produksi ternak yang memenuhi standar ekspor	100	100	100			
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase kawasan pertanian yang dapat dilindungi	90	97,50	108,33	415.050.966	375.202.370	90,40
5. Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Kelompok Tani menjadi kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	5	9	180	241.707.400	145.768.750	60,31
6. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase sumber daya pertanian yang berkualitas	7	13	185,71	643.379.600	364.942.900	56,72
	Jumlah Petani Mileneal	103	103	100			
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	10,04	3,86	38,48	1.336.804.800	893.443.568	66,83
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Luasan Budidaya yang Diintervensi	50,40	50,40	100	1.041.963.737	1.006.821.169	96,63
	Persentase Benih Ikan Unggul yang Disediakan	54,22	47,12	86,90			
	Persentase Pengujian dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Dilaksanakan	60	60	100			
	Persentase Pembudidaya yang memiliki kompetensi	65	100	153,85			
9. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kasus Pelanggaran Ilegal Fishing yang ditindaklanjuti	100	100	100	672.664.700	647.551.532	96,27
10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Peningkatan Produk Hasil Olahan Perikanan	2.715,75	2.249,58	82,83	34.194.183	29.952.000	87,59



Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Koperasi Sehat

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat penyelesaian laporan tahunan	80,86	80,86	100	456.682.200	331.741.200	72,64
	Persentase kewajiban anggota koperasi	78,26	78,26	100			
2. Program Pengembangan UMKM	Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya	22,40	22,40	100	398.305.400	354.412.546	88,98

**SASARAN 9: MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 9 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Peningkatan retribusi dan pajak daerah	26 milyar	24,12 milyar	92,76
<b>Rata-rata</b>			<b>92,76</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah **Sangat Baik/Tinggi** atau tercapai 92,76%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Peningkatan retribusi dan pajak daerah	21,10 Milyar	29,52 milyar	20,50 milyar	20,15 milyar	24,12 milyar	26 milyar	27 milyar



Jumlah realisasi penerimaan semua Retribusi dan Pajak berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah	Rp.	17.300.630.533,90
b. Retribusi Daerah	Rp.	6.818.208.641,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>24.118.839.174,90</b>

Untuk tahun 2022, realisasi pendapatan Pajak Daerah dapat memenuhi/melebihi target yang telah direncanakan. Pencapaian tersebut tentunya adalah hasil upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. Upaya yang dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi pajak daerah, baik secara langsung maupun melalui media.
2. Penerbitan surat himbauan, surat teguran dan surat tagihan terhadap objek pajak.
3. Pembuatan dan pendistribusian sarana promosi pajak. (banner dan leaflet)
4. Koordinasi/rapat yang intens dengan SKPD terkait.
5. Pelaksanaan kegiatan anugerah pajak sebagai salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap objek pajak.
6. Pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak.

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah diatur melalui Peraturan Daerah dan pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan.

Untuk pencapaian realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2021 ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan, dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Hal ini dikarenakan seluruh puskesmas tidak lagi melakukan penyetoran pendapatan ke pemerintah daerah melainkan menjadi pendapatan BLUD puskesmas. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna meningkatkan penerimaan pada sektor Retribusi Daerah yakni :

1. Koordinasi yang intens dengan SKPD pengelola Retribusi Daerah.
2. Pendataan objek Retribusi Daerah baru.
3. Revisi terhadap Peraturan Daerah sebagai bentuk tindak lanjut pendataan objek Retribusi Daerah baru.
4. Revisi terhadap tarif Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung oleh program sebagai berikut :



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100	80,61	80,61	1.235.067.000	986.522.800	79,88
	Persentase jenis Pajak Daerah yang menerapkan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah	81,82	100,89	123,31			
	Persentase piutang pajak yang berhasil tertagih	100	99,41	99,41			

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang bertujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tidak hanya dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya peningkatan PAD tidak boleh berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kelompok masyarakat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah juga harus mempertimbangkan tata kelola keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, sehingga arah pengelolaan pendapatan daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yaitu anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*).

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih banyak tergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada era otonomi, daerah diharapkan dapat memacu tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber pendapatan daerah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi lebih ditujukan pada sumber pendapatan yang sudah ada namun belum optimal pemungutannya, sedangkan ekstensifikasi lebih ditujukan pada sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan, yang disesuaikan dengan potensi daerah.



Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi :

- a. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan secara rutin terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui penyesuaian tarif, perluasan subyek, obyek pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan percepatan proses penyusunan peraturan daerah berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan peran BUMD dalam memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah.
- e. Peningkatan kualitas Pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perizinan.
- f. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak Pusat Dan Provinsi (PPH perorangan, PBB, dan PKB-BBNKB). Serta bagi hasil bukan pajak /sumber daya alam (SDA).
- g. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi penerimaan daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga perolehan dana perimbangan yang memadai.
- h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah diatas, perlu menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini diimbangi dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal, serta memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD sehingga berbagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. Kebijakan alokasi belanja sudah mendasarkan pada prioritas program dan kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.



**SASARAN 10: MENINGKATNYA INVESTASI PMDN**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 10 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	6,00	7,94	132,33
<b>Rata-rata</b>			<b>132,33</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya investasi PMDN adalah **Sangat Baik/Tinggi** atau tercapai 132,33%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	3,00	151,54	8,51	12,43	7,94	6	7,00

Tahun 2022 persentase peningkatan penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 7,94%, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seperti keterbatasan pengembangan inventarisasi potensi keunggulan daerah, belum optimalnya sosialisasi dan promosi untuk menunjang peningkatan Iklim Investasi, masih kurangnya sarana dan prasarana serta infrastruktur sebagai penguatan investasi di daerah dan belum tersedianya jaminan kepastian penanaman modal di daerah.

Sehingga perumusan kebijakan dalam arah perencanaan untuk Penguatan dan Peningkatan serta Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat dibutuhkan untuk melakukan Kesepakatan Kerjasama (MoU) dengan berbagai stakeholder dan pihak pengusaha dalam bentuk kemitraan yang telah maju merintis Pengembangan Potensi Daerah dalam hal Peningkatan Produktifitas pengusaha kecil dan UMKM maupun Koperasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.



Meningkatkan Promosi baik dalam daerah maupun luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui event Indonesian week maupun kegiatan sejenisnya untuk pengembangan informasi Budaya, Pariwisata dan Peluang Investasi, mewujudkan Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan Investasi, menyusun Regulasi sebagai perangkat dan landasan hukum dalam upaya peningkatan serta memberikan jaminan berusaha di daerah serta membetuk dan mengoperasionalkan kinerja Tim Percepatan Berusaha di daerah sebagai dukungan Pemerintah dalam upaya peningkatan Iklim Investasi yang lebih baik.

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan Pemenuhan aspek Pelayanan Publik (Aspek)	6	6	100	1.084.881.836	995.391.546	91,75
	Persentase usaha risiko tinggi yang berizin	100	100	100			
2. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Sarana Prasarana di kawasan Investasi Siap pakai	100	100	100	326.885.750	325.184.172	99,48
	Persentase kawasan investasi yang memenuhi persyaratan/sesuai peruntukan	100	100	100			
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jumlah pengguna layanan Perizinan dan Non Perizinan telah memenuhi kewajiban pajak	100	100	100	31.894.400	25.750.000	80,74
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemenuhan pemberian Insentif dan kemudahan berusaha Penanaman Modal	100	100	100	419.973.300	390.574.678	93,00
	Persentase Regulasi Penanaman Modal/ Investasi yang selaras dengan UUCK	100	100	100			



**SASARAN 11: MENINGKATNYA PEMANFAATAN POTENSI PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BAGI MASYARAKAT**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 11 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Tingkat Pengeluaran Wisatawan ( <i>Spending of money</i> )	Rp.7.873.326.000	Rp.14.705.425.000	186,78
<b>Rata-rata</b>			<b>186,78</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat adalah **Sangat Baik/Tinggi** atau sebesar 186,78%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Tingkat Pengeluaran Wisatawan ( <i>Spending of money</i> )	Rp. 3.223.750.000	Rp 4.758.098.000	Rp. 7.337.250.000	Rp. 7.204.500.000	Rp. 14.705.425.000	Rp. 7.873.326.000	Rp. 9.073.800.000

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat Pengeluaran Wisatawan (*Spending of money*) didukung oleh program sebagai berikut:

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	2,74	2,74	100	1.704.849.600	1.546.965.368	90,74
2. Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata melalui media partisipasi event berskala nasional/provinsi (media/event)	2	2	100	949.286.000	804.711.700	84,77
	Persentase event pariwisata tingkat nasional dan tingkat propinsi	40	40	100			



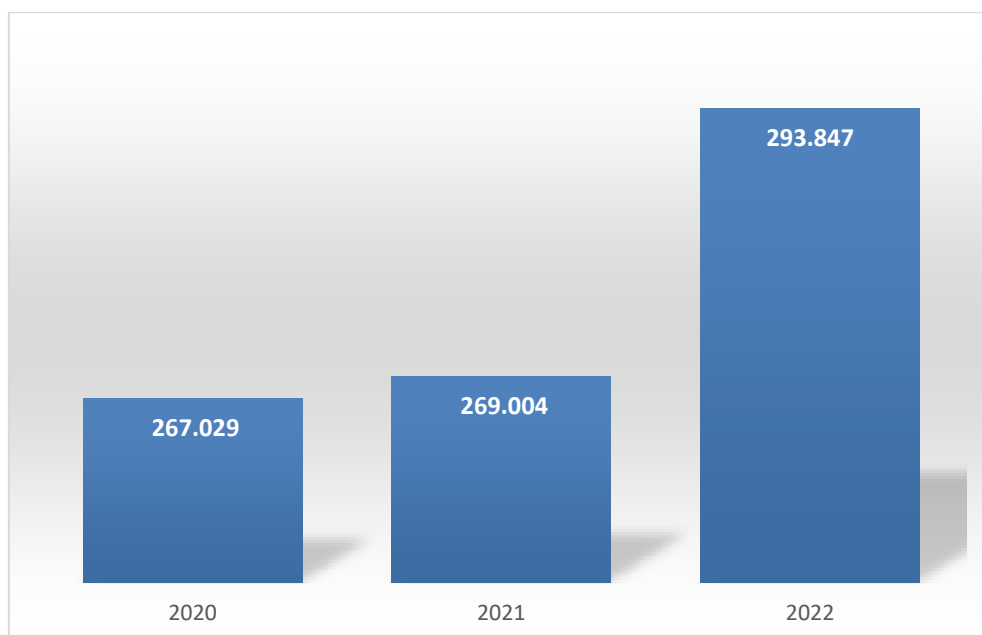


Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase desa wisata yang mengembangkan ekonomi kreatif	33,33	33,33	100	696.620.000	545.990.000	78,38
4. Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan OPK yang Mendukung Pariwisata	90	90	100	1.766.600.000	1.735.890.000	98,26
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Amenitas Cagar Budaya yang Berkualitas atau Memenuhi Standar	63	63	100	788.000.000	788.000.000	100,00
6. Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Museum yang Dikelola	1	1	100	700.000.000	693.667.500	99,10

Pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money) dipengaruhi oleh Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dan Lama tinggal wisatawan (Length of Stay).

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	REALISASI
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	$\frac{(\text{Realisasi kunjungan wisatawan tahun } n-(n-1))}{\text{kunjungan wisatawan } n-1} \times 100$ $\frac{(293.847-269.004)}{269.004} \times 100 = 9,24\%$	293.847 wisatawan

Pencapaian kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun sejak tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 yakni sebanyak 267.029 wisatawan pada tahun 2021 menjadi 293.847 wisatawan pada tahun 2022.





<b>MISI</b> <b>3</b>	<b>MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL YANG MENUNJANG SEKTOR PEREKONOMIAN</b>
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

<b>TUJUAN</b> <b>3</b>	<b>MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL YANG BERKUALITAS</b>
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Capaian Tujuan Ketiga pada Misi Tiga Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian yakni **“Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.”**

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 1 (satu) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>SASARAN 12: MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL YANG BERKUALITAS</b>
-----------------------------------------------------------------------------------

Capaian kinerja Sasaran Strategis 12 pada **Tujuan III : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan $\geq 40$ Km/jam	65,80	69,58	105,75
Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	69,10	70,47	101,99
Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	86,00	85,71	99,67
Persentase kecukupan RTH publik	24,87	38,06	153,04
Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	74,88	59,88	79,97
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>108,08</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas adalah **Sangat Baik/Tinggi** atau tercapai 108,08%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan $\geq 40$ Km/jam	74,50	64,03	66,04	68,37	69,58	65,80	67,00
Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	85,00	61,95	65,60	68,49	70,47	67,35	69,10
Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	14,00	23,81	52,38	66,67	85,71	86,00	100
Persentase kecukupan RTH publik	24,83	37,10	37,34	37,89	38,06	24,87	24,87
Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	40,66	19,23	34,47	52,29	59,88	74,88	82,32

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran:**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan $\geq 40$ Km/jam	65,80	69,58	105,75

Pada indikator kinerja sasaran Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan  $\geq 40$  Km/jam dari target 65,80, terealisasi 69,58 yang berarti **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 105,75%.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990, jaringan jalan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Jalan dengan kondisi yang mantap (stabil) adalah jalan yang selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama yang kondisinya sudah baik/sedang yang hanya memerlukan pemeliharaan.
2. Jalan dengan kondisi tidak mantap adalah jalan yang tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama kondisinya rusak/rusak berat yang memerlukan pekerjaan berat (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi) termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda 4.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang (kondisi mantap) ditargetkan 60% harus terpenuhi tahun 2019, dengan Jumlah kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi yang terbangun harus 100%.



Rumus Perhitungan Persentase jalan dalam kondisi mantap :

Jumlah panjang jalan kondisi mantap (baik + sedang) dibagi dengan total jumlah panjang jalan kabupaten dikali 100%

$$\frac{595,96}{859,36} \times 100\% = 69,58\%$$

Capaian Indikator Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2022 sepanjang 595,96 km dari total 859,36 km panjang jalan kabupaten atau sebesar 69,58%. Hal ini lebih besar dari target SPM sebesar 60% yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan  $\geq 40$  km/jam didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan  $\geq 40$  km/jam

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Konektivitas Jalan Kondisi Mantap	78,67	78,71	100,05	81.238.202.380	51.505.970.062	63,40
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Angka Kejadian Kecelakaan dalam 1 tahun	0	42	-42	2.128.469.392	1.568.601.600	73,70
3. Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Cakupan Pengelolaan Angkutan Sungai dan Danau	85	85	100	582.217.300	520.953.250	89,48

#### Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	69,10	70,47	101,99

Pada indikator kinerja sasaran Persentase kinerja sistem jaringan irigasi dari target 69,10, terealisasi 70,47 yang berarti Sangat **Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 101,99%.

Standar Pelayanan Minimum di bidang Sumber Daya Air sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang



STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi sistem irigasi baik ditargetkan 70% harus terpenuhi tahun 2021.

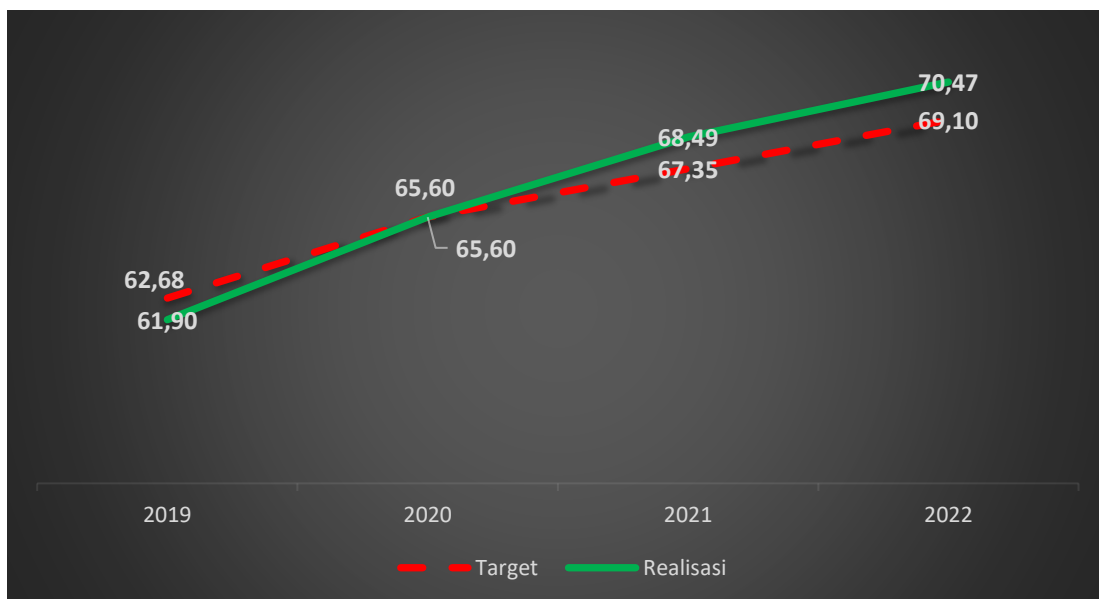
Rumus Perhitungan Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi adalah sebagai berikut :

Jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100 %

$$\frac{13.409}{19.027} \times 100 = 70,47\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka capaian indikator persentase kinerja sistem irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 teralisasi sebesar 70,47% melebihi target yang ingin dicapai yakni 69,10%.

**Grafik**  
**Grafik Capaian Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi 2019-2022**



Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kinerja sistem jaringan irigasi didukung oleh program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kinerja sistem jaringan irigasi

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	69,10	70,47	101,99	28.468.965.958	26.898.876.437	94,48

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**



INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	86,00	85,71	99,67

Pada indikator kinerja sasaran Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik dari target 86,00, terealisasi 85,71 yang berarti **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 99,67%.

Pengukuran persentase Bangunan Publik yang terbangun sebagai berikut: Jumlah Bangunan Publik yang terbangun dibagi jumlah total bangunan pelayanan publik yang dibutuhkan X 100%

$$\frac{18 \text{ Buah}}{21 \text{ Buah}} \times 100\% = 85,71\%$$

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik didukung oleh program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase Perkotaan Yang Bersih Dan Bebas Genangan	66	76	115,15	1.953.044.000	1.923.757.760	98,50
2. Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Publik Yang Berfungsi Baik	85,71	85,71	100	22.603.506.000	21.219.944.961	93,88
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Bersertifikat	34	34	100	650.593.650	155.253.289	23,86

a. Pengukuran Rasio rumah tangga yang memiliki akses sarana air bersih layak sebagai berikut: Jumlah KK yang mendapatkan akses air bersih yang layak dibagi jumlah KK se Kab.HSS

$$\frac{53.284 \text{ KK}}{56.296 \text{ KK}} = 0,95\%$$



- b. Pengukuran Rasio rumah tangga yang memiliki akses sarana sanitasi Layak sebagai berikut: Jumlah KK yang mendapatkan akses air limbah yang memadai dibagi jumlah KK se Kab.HSS

$$\frac{48.090 \text{ KK}}{56.296 \text{ KK}} = 0,85$$

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Persentase kecukupan RTH publik	24,87	31,84	128,03

Pada indikator kinerja sasaran Persentase kecukupan RTH publik dari target 24,87, terealisasi 38,06 yang berarti **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 153,04%.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kecukupan RTH publik didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kecukupan RTH publik

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Jumlah Kecamatan yang memiliki Rasio Kecukupan luasan RTH kecamatan $\geq$ 0,3	72,73	45,45	62,49	5.303.631.300	4.762.112.750	89,79
	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100			
	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	6,48	6,37	98,20			

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	74,88	59,88	79,97



Pada indikator kinerja sasaran Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dari target 74,88, terealisasi 59,88 yang berarti **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 79,97%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas 40% dipengaruhi oleh indikator program Persentase Jumlah Rumah Layak Huni, 20% dari Persentase Jumlah Perumahan Sehat, dan 40% dari Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas didukung oleh program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran : perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	100	136.219.550	115.567.750	84,84
	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	100	100			
2. Program Kawasan Permukiman	Presentase Rumah layak Huni	48,78	48,59	99,61	2.069.352.000	2.005.649.000	96,92
	Presentase PSU Permukiman yang berkualitas	49,37	58,23	117,95			
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase Rumah layak Huni	48,78	48,59	99,61	2.145.750.000	2.122.566.600	98,92
	Presentase PSU Permukiman yang berkualitas	49,37	58,23	117,95			
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase PSU Perumahan yang berkualitas	65,38	61,54	94,12	4.138.786.000	4.037.503.923	97,55
5. Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Perumahan dengan administrasi	65,38	61,54	94,12	88.888.750	73.427.200	82,61





Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	pertanahan lengkap						

<b>MISI 4</b>	<b>MENGOPTIMALKAN SUMBERDAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

<b>TUJUAN 4</b>	<b>MENINGKATKAN SUMBER DAYA DAERAH DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capaian Tujuan pertama pada Misi Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan yakni **“Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan”**

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 3 (tiga) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>SASARAN 13: MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT</b>
----------------------------------------------------------------------------

Capaian kinerja Sasaran Strategis 13 pada **Tujuan IV : Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,69	0,73	105,13
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>105,13</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat adalah **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 105,13%.



Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,62	0,65	0,67	0,70	0,73	0,69	0,71

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir capaian rata-rata IDM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan.

Pengukuran IDM dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Desa dan verifikasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan tingkat Nasional. Secara resmi nilai IDM ditetapkan oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah nilai komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM yang dimaksud rata-rata IDM yang dicapai oleh seluruh Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Cara pengukuran Realisasi Capaian indikator Kinerja Sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Indeks Desa Membangun (IDM)	$IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ <p>IDM = rata-rata Indeks Desa Membangun Kab.HSS</p>	$\frac{104,46}{144} = 0,73$
	<p><math>\sum IDM \text{ se Kab.HSS}</math> : Jumlah IDM Desa se Kab.HSS</p> <p><math>\sum \text{Desa se Kab.HSS}</math> : Jumlah Desa</p>	

Proses pengukuran IDM dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian diverifikasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta provinsi dan nasional. Untuk pengukuran IDM tahun 2022 saat ini telah dilakukan pengukuran mulai tingkat Desa, Kabupaten dan datanya sudah



diserahkan ke tingkat Provinsi, dan sedang dalam proses evaluasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nilai IDM menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian suatu Desa. Klasifikasi status desa dikategorikan dengan ambang batas sebagai berikut :

- 1). Desa Sangat Tertinggal, dengan nilai IDM < 0,4907
- 2). Desa Tertinggal, dengan nilai 0,4907 < IDM ≤ 0,5989
- 3). Desa Berkembang, dengan nilai 0,5989 < IDM ≤ 0,7072
- 4). Desa Maju, dengan nilai 0,7072 < IDM ≤ 0,8155
- 5). Desa Mandiri, dengan nilai 0,7072 IDM ≥ 0,8155

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Nilai IDM dan Status Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.15 Nilai IDM dan Status Perkembangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022**

NO	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
1	Hamalau	0,9143	0,8333	0,8000	0,8492	MANDIRI
2	Telaga Bidadari	0,6971	0,6000	0,6667	0,6546	BERKEMBANG
3	Karasikan	0,7829	0,5500	0,6667	0,6665	BERKEMBANG
4	Sungai Raya Utara	0,7943	0,6333	0,6667	0,6981	BERKEMBANG
5	Sungai Raya Selatan	0,8686	0,6833	0,6667	0,7395	MAJU
6	Hariti	0,8114	0,6167	0,6667	0,6963	BERKEMBANG
7	Ida Manggala	0,7543	0,6000	0,8667	0,7403	MAJU
8	Bumi Berkat	0,6971	0,5000	0,8667	0,6879	BERKEMBANG
9	Batang Kulur Kiri	0,7314	0,6000	0,6667	0,666	BERKEMBANG
10	Batang Kulur Tengah	0,8000	0,5667	0,6667	0,6778	BERKEMBANG
11	Batang Kulur Kanan	0,7943	0,5500	0,6667	0,6703	BERKEMBANG
12	Baru	0,7371	0,5667	0,8000	0,7013	BERKEMBANG
13	Tamiyang	0,7714	0,6500	0,6667	0,696	BERKEMBANG
14	Asam	0,8057	0,4333	0,6667	0,6352	BERKEMBANG
15	Sungai Kali	0,7543	0,5667	0,8000	0,707	BERKEMBANG
16	Sarang Halang	0,7143	0,5667	0,8000	0,6937	BERKEMBANG
17	Paring Agung	0,7029	0,6500	0,6667	0,6732	BERKEMBANG
18	Tanah Bangkang	0,7886	0,5167	0,6667	0,6573	BERKEMBANG
19	Karang Jawa Muka	0,8800	0,6500	0,6000	0,7100	MAJU
20	Karang Jawa	0,7486	0,8000	0,6000	0,7162	MAJU
21	Tabihi	0,7943	0,6333	0,6000	0,6759	BERKEMBANG
22	Pandulangan	0,7771	0,7667	0,6667	0,7368	MAJU
23	Kaliring	0,7829	0,6167	0,6000	0,6665	BERKEMBANG
24	Jambu Hulu	0,7943	0,6000	0,6667	0,687	BERKEMBANG
25	Pahampangan	0,7657	0,6333	0,6667	0,6886	BERKEMBANG
26	Padang Batung	0,7600	0,7500	0,6667	0,7256	MAJU
27	Jembatan Merah	0,7657	0,5667	0,6667	0,6663	BERKEMBANG
28	Batu Bini	0,7486	0,7167	0,5333	0,6662	BERKEMBANG
29	Mawangi	0,6914	0,7167	0,6000	0,6694	BERKEMBANG
30	Madang	0,7543	0,5667	0,8000	0,707	BERKEMBANG



NO	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
31	Durian Rabung	0,8686	0,6167	0,6667	0,7173	MAJU
32	Jelatang	0,6743	0,6833	0,6000	0,6525	BERKEMBANG
33	Batu Laki	0,7200	0,5833	0,7333	0,6789	BERKEMBANG
34	Malutu	0,7314	0,5500	0,6667	0,6494	BERKEMBANG
35	Malilingin	0,8800	0,5833	0,5333	0,6656	BERKEMBANG
36	Lok Binuang	0,7943	0,5667	0,8667	0,7425	MAJU
37	Telaga Langsung	0,7600	0,6333	1	0,7978	MAJU
38	Mandala	0,8514	0,6000	1	0,8171	MANDIRI
39	Ambutun	0,7429	0,4333	0,8667	0,681	BERKEMBANG
40	Hamak	0,7029	0,5500	0,8667	0,7065	BERKEMBANG
41	Hamak Timur	0,7257	0,5500	1	0,7586	MAJU
42	Hamak Utara	0,7371	0,5000	0,8667	0,7013	BERKEMBANG
43	Pakuan Timur	0,7771	0,5000	0,8667	0,7146	MAJU
44	Gumbil	0,7429	0,5667	0,6667	0,6587	BERKEMBANG
45	Longawang	0,7314	0,6333	0,8667	0,7438	MAJU
46	Pandulangan	0,7486	0,6000	0,8667	0,7384	MAJU
47	Bamban Utara	0,8457	0,7667	0,6000	0,7375	MAJU
48	Bamban	0,7714	0,6667	0,8000	0,7460	MAJU
49	Bamban Selatan	0,8800	0,7333	0,6667	0,7600	BERKEMBANG
50	Kayu Abang	0,7543	0,6333	0,6000	0,6625	BERKEMBANG
51	Angkinang	0,8286	0,7667	0,6000	0,7317	MAJU
52	Telaga Sili-Sili	0,8057	0,6333	0,8667	0,7686	MAJU
53	Angkinang Selatan	0,8457	0,7667	0,6667	0,7597	MAJU
54	Tawia	0,7543	0,6667	0,8000	0,7403	MAJU
55	Taniran Kubah	0,8286	0,6333	0,6000	0,6873	BERKEMBANG
56	Taniran Selatan	0,7486	0,6167	0,8000	0,7217	MAJU
57	Bakarung	0,7943	0,8167	0,6000	0,7370	MAJU
58	Gambah Luar	0,8114	0,6000	0,8000	0,7371	MAJU
59	Gambah Luar Muka	0,8971	0,6833	0,9333	0,8379	MANDIRI
60	Gambah Dalam	0,8914	0,6500	0,8667	0,8027	MAJU
61	Gambah Dalam Barat	0,6971	0,6500	0,8000	0,7157	MAJU
62	Sungai Kupang	0,8286	0,6167	0,8000	0,7484	MAJU
63	Bangkau	0,7200	0,6333	0,8667	0,7400	MAJU
64	Lungau	0,7371	0,6333	0,8000	0,7235	MAJU
65	Sungai Paring	0,7886	0,6667	0,8667	0,7740	MAJU
66	Bariang	0,7886	0,6167	0,8000	0,7351	MAJU
67	Amawang Kiri	0,8000	0,6167	0,9333	0,7833	MAJU
68	Amawang Kiri Muka	0,8286	0,6667	0,8667	0,7873	MAJU
69	Amawang Kanan	0,8971	0,8000	0,8667	0,8546	MANDIRI
70	Tibung Raya	0,9200	0,8333	0,8667	0,8733	MANDIRI
71	Baluti	0,9657	0,6833	0,8000	0,8163	MANDIRI
72	Tebing Tinggi	0,7886	0,5667	0,6667	0,6740	BERKEMBANG
73	Simpur	0,8286	0,6833	0,6667	0,7262	MAJU
74	Garunggang	0,7314	0,5667	0,8667	0,7216	MAJU
75	Amparaya	0,7657	0,6000	0,6667	0,6775	BERKEMBANG
76	Panjampang Bahagia	0,7086	0,6000	0,6667	0,6584	BERKEMBANG
77	Ulin	0,7543	0,6333	0,6667	0,6848	BERKEMBANG
78	Pantai Ulin	0,8229	0,6000	0,6000	0,6743	BERKEMBANG
79	Wasah Hulu	0,8171	0,6333	0,8667	0,7724	MAJU
80	Wasah Tengah	0,8114	0,6000	0,8667	0,7594	MAJU
81	Wasah Hilir	0,7257	0,6833	0,9333	0,7808	MAJU
82	Kapuh	0,8000	0,6333	0,9333	0,7889	MAJU
83	Muning Baru	0,7257	0,6667	0,8667	0,7530	MAJU



NO	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
84	Muning Dalam	0,7429	0,4667	0,8667	0,6921	BERKEMBANG
85	Muning Tengah	0,7314	0,5667	0,8667	0,7216	MAJU
86	Banjarbaru	0,7943	0,6167	0,8667	0,7592	MAJU
87	Bayanan	0,7771	0,6667	0,8000	0,7479	MAJU
88	Pandan Sari	0,7771	0,6500	0,7333	0,7202	MAJU
89	Pihanin Raya	0,7143	0,6833	0,8000	0,7325	MAJU
90	Tumbukan Banyu	0,9029	0,8500	0,7333	0,8287	MANDIRI
91	Sungai Pinang	0,7657	0,6000	0,8000	0,7219	MAJU
92	Habirau	0,7257	0,5667	0,8667	0,7197	MAJU
93	Habirau Tengah	0,7600	0,6000	0,8667	0,7422	MAJU
94	Parigi	0,7771	0,5667	0,8667	0,7368	MAJU
95	Banua Hanyar	0,7486	0,6167	0,9333	0,7662	MAJU
96	Tambangan	0,7143	0,6000	1	0,7714	MAJU
97	Baruh Jaya	0,7543	0,5000	0,9333	0,7292	MAJU
98	Samuda	0,8000	0,6000	0,8000	0,7333	MAJU
99	Pakapuran Kecil	0,7886	0,6000	0,8667	0,7517	MAJU
100	Panggandingan	0,7771	0,6667	0,9333	0,7924	MAJU
101	Tambak Bitin	0,9200	0,8167	0,8667	0,8678	MANDIRI
102	Pakan Dalam	0,7943	0,6000	0,8667	0,7537	MAJU
103	Paramaian	0,7543	0,6833	0,8000	0,7459	MAJU
104	Pandak Daun	0,7943	0,6167	0,8000	0,737	MAJU
105	Murung Raya	0,6857	0,6667	0,9333	0,7619	MAJU
106	Balah Paikat	0,6800	0,7000	0,9333	0,7711	MAJU
107	Sungai Garuda	0,7543	0,7333	0,9333	0,807	MAJU
108	Sungai Mandala	0,8057	0,6833	0,8000	0,763	MAJU
109	Mdl. Murung Mesjid	0,7429	0,6333	0,9333	0,7698	MAJU
110	Baruh Kembang	0,7886	0,6833	0,8667	0,7795	MAJU
111	Teluk Haur	0,7086	0,6500	0,8667	0,7417	MAJU
112	Pasungkan	0,7543	0,7000	0,8000	0,7514	MAJU
113	Teluk Kabak	0,8000	0,6500	0,8000	0,7500	MAJU
114	Hamayung	0,7486	0,7833	0,7333	0,7551	MAJU
115	Hamayung Utara	0,7200	0,6500	0,8667	0,7456	MAJU
116	Paharangan	0,7886	0,6667	0,9333	0,7962	MAJU
117	Hakurung	0,7200	0,6167	0,6000	0,6456	BERKEMBANG
118	Balimau	0,7600	0,5000	0,9333	0,7311	MAJU
119	Karang Paci	0,7029	0,5000	0,9333	0,7121	MAJU
120	Bago Tanggul	0,7314	0,5500	0,8000	0,6938	BERKEMBANG
121	Karang Bulan	0,7257	0,5333	0,8667	0,7086	MAJU
122	Balanti	0,6971	0,6333	0,8667	0,7324	MAJU
123	Kalumpang	0,7371	0,7500	0,8667	0,7846	MAJU
124	Tambingkar	0,6857	0,6000	0,9333	0,7397	MAJU
125	Sirih	0,8114	0,6500	0,8667	0,7760	MAJU
126	Sirih Hulu	0,7771	0,5833	0,9333	0,7646	MAJU
127	Halunuk	0,6914	0,4667	0,9333	0,6971	BERKEMBANG
128	Panggungan	0,6629	0,5500	0,8667	0,6932	BERKEMBANG
129	Lumpangi	0,6800	0,5000	0,8667	0,6822	BERKEMBANG
130	Malinau	0,6114	0,6000	0,8667	0,6927	BERKEMBANG
131	Hulu Banyu	0,7086	0,6333	0,7333	0,6917	BERKEMBANG
132	Tumingki	0,6743	0,4833	0,9333	0,6970	BERKEMBANG
133	Kamawakan	0,7143	0,4833	0,6667	0,6214	BERKEMBANG
134	Lok Lahung	0,6514	0,7167	0,6667	0,6783	BERKEMBANG
135	Loksado	0,8000	0,7167	0,8000	0,7722	MAJU
136	Haratai	0,6571	0,5333	0,8667	0,6857	BERKEMBANG



NO	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
137	Ulang	0,6057	0,6333	0,6667	0,6352	BERKEMBANG
138	Siang Gantung	0,6400	0,5667	0,8000	0,6689	BERKEMBANG
139	Baru	0,7029	0,6167	0,7333	0,6843	BERKEMBANG
140	Tanjung Selor	0,6800	0,5667	0,7333	0,6600	BERKEMBANG
141	Badaun	0,6286	0,6333	0,7333	0,6651	BERKEMBANG
142	Bajayau	0,7600	0,6333	0,7333	0,7089	MAJU
143	Bajayau Tengah	0,6971	0,5500	0,8000	0,6824	BERKEMBANG
144	Bajayau Lama	0,6629	0,6667	0,7333	0,6876	BERKEMBANG

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat perkembangan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2022 menurut kategori perkembangannya, sebagai berikut :

**Tabel 1.16 Rekapitulasi Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022**

NO	KATEGORI DESA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Mandiri	8	5,55%
2	Maju	79	54,86%
3	Berkembang	57	39,58%
4	Tertinggal	0	0%
5	Sangat Tertinggal	0	0%
JUMLAH		144	100%

Adapun tingkat perkembangan desa dalam beberapa tahun terakhir terlihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.17 Perkembangan Kategori Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022**

NO	KATEGORI STATUS DESA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mandiri	-	-	-	3	8
2	Maju	6	11	20	44	79
3	Berkembang	99	121	122	97	57
4	Tertinggal	39	12	2	0	0
5	Sangat Tertinggal	-	-	-	0	0
JUMLAH		144	144	144	144	144

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan kategori Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada lima tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik, yaitu dengan berkurangnya jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal, serta meningkatnya jumlah desa berkembang, maju dan mandiri.

IDM merupakan komposit dari nilai indeks ketahanan sosial (IKS) indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan ekologi (IKEkolog). Untuk dapat meningkatkan nilai rata-rata IDM Kabupaten Hulu Sungai



Selatan maka perlu ditingkatkan nilai semua aspek pada IKS, IKE dan IKEkologi.

Berdasarkan evaluasi pencapaian IDM pada masing-masing komponen yang masih rendah pada aspek ketahanan Ekonomi rata-rata 0,6262 Sedangkan pada aspek ketahanan sosial dan ketahanan ekologi masing-masing 0,7635 dan 0,7866. Adapun faktor yang menjadi penunjang pencapaian IDM, sebagai berikut :

- a. Pemerintahan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang menggunakan IDM sebagai salah satu acuan dalam penyusunan kegiatan dalam APBDes.
- b. Adanya dukungan program lintas sektor pada SKPD terkait seperti penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan untuk akses masyarakat ke sarana pendidikan, kesehatan maupun pusat ekonomi masyarakat.

Dalam rangka untuk meningkatkan nilai pada aspek-aspek penyusun nilai IDM diperlukan sinergitas program lintas sektor, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya. Namun Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sebagai SKPD utama yang bertanggungjawab dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) didukung oleh program sebagai berikut:

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pengurus BUMDes yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Bumdes	21,76	21,76	100	14.375.000	13.250.000	92,17
2. Program Penataan Desa	Persentase desa dengan Tata Wilayah yang sudah ditetapkan	32,64	32,64	100	28.904.950	21.483.500	74,32
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kesesuaian RKPDes Terhadap RPJMDes	100	100	100	328.726.600	287.592.450	87,49
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Sehat Sejahtera	60,42	60,42	100	716.628.700	623.390.994	86,99
	Persentase Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi	60,42	60,42	100			
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang berwirausaha	7,71	7,83	101,56	1.720.817.500	1.503.322.507	87,36



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Presentase Pemuda yang aktif dalam organisasi Kepemudaan dan Sosial	13,29	16,02	120,54			
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase cabang olahraga yang memiliki binaan berdasarkan kelompok umur	47	47	100	29.129.071.191	27.450.047.311	94,24
	Presentase cabang olahraga yang menyelenggarakan Event/ kejuaraan di Tingkat Daerah	34	34	100			
	Presentase Masyarakat yang aktif berolahraga secara rutin	60	60	100			
	Presentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang memenuhi standar	80	80	100			
7. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan Yang Aktif	96,33	96,33	100	400.000.000	400.000.000	100,00

**SASARAN 14: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN RESPONSIF GENDER DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 14 pada **Tujuan IV : Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin Pembangunan Berkelanjutan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,91	90,05	99,05
Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	6,08	6,08	100
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>99,53</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak adalah **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 99,53%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :





INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,10	89,21	89,23	89,65	90,05	90,91	91,27
Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	0,68	2,03	3,38	4,73	6,08	6,08	7,43

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,91	90,05	99,05

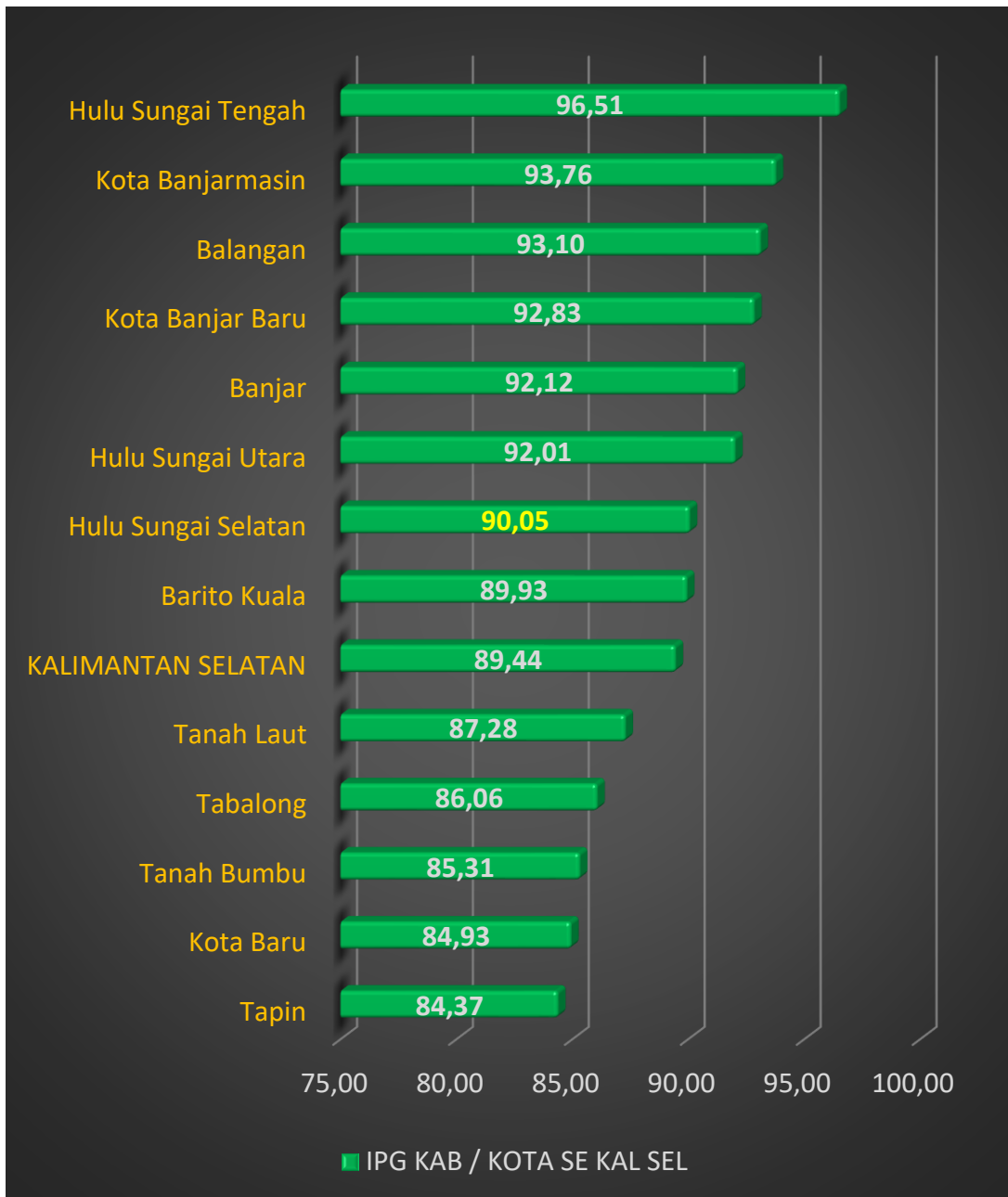
Pada indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari target 90,91, terealisasi 90,05, yang berarti **Sangat Baik/Tinggi** atau sebesar 99,05%.

IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Dengan terpisahnya IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka capaian pembangunan masing-masing kelompok gender tersebut dapat diperbandingkan. Pembangunan manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) (KPPPA dan BPS, 2021).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Selatan pada tahun 2022 bernilai 89,44 poin. Kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi akan semakin mudah tercapai jika nilai IPG mendekati 100.

Capaian IPG Kalimantan Selatan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya juga diikuti dengan tidak berubahnya posisi dari kelima kabupaten /kota yang memiliki capaian IPG di bawah capaian IPG provinsi. Pada Gambar dibawah terlihat bahwa 5 kabupaten yang pencapaian IPG-nya masih di bawah rata-rata pencapaian IPG di tingkat provinsi, yakni Kabupaten Tanah Laut, Tabalong, Tapin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru.

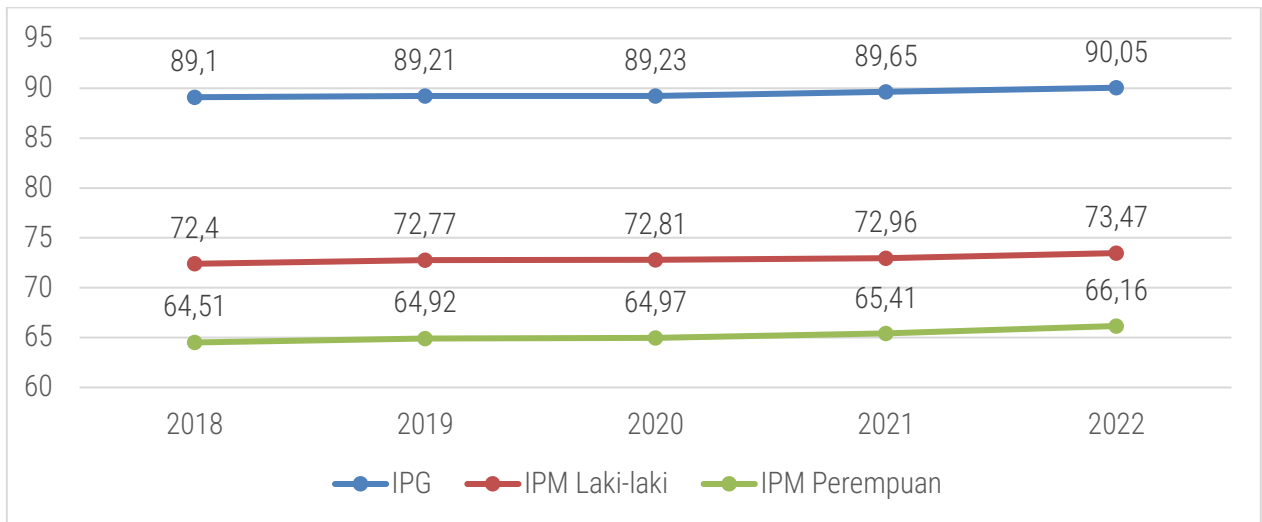


Gambar Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2022

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Capaian IPG tertinggi untuk tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan IPG sebesar 96,51 poin. Sementara itu, IPG terendah yaitu Kabupaten Tapin dengan IPG sebesar 84,37 poin. IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada peringkat 7 berada di atas IPG Provinsi dengan capaian sebesar 90,05 poin.

Gambar dibawah menunjukkan perkembangan IPM laki-laki, IPM perempuan, dan IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 2018-2022.



Gambar Tren Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2018–2022

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa IPM laki-laki dan IPM perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sama-sama mengalami peningkatan selama periode 2018–2022. Secara umum kualitas pembangunan perempuan masih tertinggal daripada laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari capaian IPM perempuan yang lebih rendah dibanding IPM perempuan selama kurun waktu lima tahun. Sementara jika dilihat dari kecepatannya, selama periode 2018-2022, capaian pembangunan laki-laki memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, diperlukan adanya program-program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender agar tercapai peningkatan kapabilitas dasar perempuan.

Capaian IPG selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan. IPG meningkat dari 89,23 menjadi 89,65 pada 2021. Kemudian mengalami peningkatan lagi sebesar 0,40 menjadi 90,05 pada tahun 2022. Peningkatan IPG dalam kurun dua tahun terakhir disebabkan oleh pembangunan perempuan yang memiliki akselerasi lebih cepat daripada laki-laki.

Peningkatan capaian IPG tahun 2022 patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemerintah yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender memberikan hasil yang positif. Namun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender perlu dimaksimalkan lagi agar ke depannya perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak dasarnya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya serta politik.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung oleh program sebagai berikut :



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan data terpilah gender dan anak	94,74	100	105,56	44.004.500	42.464.900	96,50
2. Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	75.657.750	28.675.250	37,90

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	6,08	6,08	100

Pada indikator kinerja sasaran Persentase desa/kelurahan layak anak dari target 6,08, terealisasi 6,08, yang berarti **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 100%.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase desa/kelurahan layak anak didukung oleh program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase desa/ kelurahan layak anak

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa/kelurahan layak anak	6,08	6,08	100	261.542.200	259.307.800	99,15
2. Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	420.507.200	285.449.090	67,88

**SASARAN 15: MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 15 pada **Tujuan IV : Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin Pembangunan Berkelanjutan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,60	70,94	127,59
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>127,59</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah Sangat Baik/Tinggi atau Tercapai sebesar 127,59%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,94	56,23	67,04	67,04	70,94	55,60	55,77

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,60	70,94	127,59

Pada indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target 55,60, terealisasi 70,94, yang berarti **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 127,59%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas 30% dipengaruhi oleh indikator program Persentase Indeks Kualitas Udara Titik Pantau yang Memenuhi Standar, 30% dari Persentase Indeks Kualitas Air Titik Pantau yang Memenuhi Standar, dan 40% dari Persentase Tutupan Lahan pada Areal Bekas Pertambangan.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didukung oleh program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai kekeruhan(TSS) air sungai minting dan sungai rarahin di bawah batas ambang (mg/l)	50	24,7	150,60	1.042.306.200	959.502.622	92,06
	Nilai Batas Ambang Air Limbah perkebunan Kelapa Sawit, minyak lemak memenuhi nilai baku mutu (mg/l)	25	19	124			
	Persentase industri yang lulus uji Proper	100	100	100			
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	32.920.000	2.812.500	8,54
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan	6,48	6,37	98,30	576.764.800	332.384.500	57,63
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan	6,48	6,37	98,30	196.427.000	90.600.000	46,12
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Nilai kekeruhan(TSS) air sungai amandit sekitar tambang di bawah batas ambang	50	16,7	166,60	47.430.000	7.242.500	15,27



<b>MISI</b> <b>5</b>	<b>MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BINGKAI KEHIDUPAN YANG AGAMIS</b>
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

<b>TUJUAN</b> <b>5</b>	<b>MENINGKATKAN SUMBER DAYA DAERAH DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capaian Tujuan pertama pada Misi Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis yakni **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi”**

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 4 (empat) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN 16: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 16 pada **Tujuan V : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Predikat AKIP	A (80,10)	A (81,50)	101,75
Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)	A (4,54)	100,67
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>101,17</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik adalah **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai 101,17%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Predikat AKIP	BB (75,18)	BB (76,23)	BB (77,03)	A (80,02)	A (81,50)	A (80,10)	A
Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	B	B (3,97)	B (3,97)	A- (4,19)	A (4,54)	A (4,51)	A

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Predikat AKIP	A (80,10)	A (81,50)	101,75

Pada indikator kinerja sasaran Predikat AKIP dari target A (80,10), terealisasi A (81,50), yang berarti **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 101,75%.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai		Bobot	2022
			Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,10
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,90
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,16
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,34
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A (Memuaskan)	

Sumber data. Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 KemenPAN RB Nomor B/1157/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022.

Adapun perbandingan capaian indikator Predikat AKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut :

Komponen yang Dinilai	Bobot	2018	2019	2020	2021	2022
		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	24,36	25,44	25,45	25,88	26,10
b. Pengukuran Kinerja	25	18,89	19,96	20,08	21,09	24,90
c. Pelaporan Kinerja	15	10,66	11,49	11,59	11,99	12,16





Komponen yang Dinilai		Bobot	2018	2019	2020	2021	2022
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,04	7,14	7,44	8,21	18,34
e.	Capaian Kinerja	20	10,08	12,20	12,46	12,85	
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,18	76,23	77,03	80,02	81,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022	Target RPJMD	
						2022	2023
Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	A	A	A	A

Apabila dilihat pada tabel diatas, capaian indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2018 s.d tahun 2022 terus naik, dan pencapaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 naik 1,48 dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi di tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut bahwa perkembangan penerapan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, adapun rekomendasi KemenPAN RB yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Melanjutkan penyempurnaan penjenjangan kinerja pada seluruh PD dengan memperhatikan kerangka berfikir logis dalam mencapai kinerja, sehingga hubungan antar level jabatan kinerja dapat sepenuhnya terkait antara satu dengan yang lain;
2. Melakukan penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam rangka *refocusing* program/kegiatan;
3. Melakukan penyempurnaan pada aplikasi e sakip dengan memasukkan rencana aksi sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi seluruh PD dalam pengukuran kinerja. Serta Menyusun pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja/LPPD dengan menyajikan informasi mengenai analisis strategi dan tindak lanjut yang akan



dilakukan dalam menyempurnakan atau meningkatkan kinerja kedepannya. Selain itu, perlu meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta seluruh PD untuk menyampaikan dokumen laporan Kinerja/LPPD secara tepat waktu dan dipublikasikan pada website Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan

5. Mendorong APIP/Inspektorat untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan meningkatkan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal sehingga memberikan rekomendasi yang signifikan memacu perbaikan akuntabilitas kinerja internal sebagai salah satu dasar dalam pemberian *reward and punishment* kepada PD.

Sebagai langkah nyata membangun SAKIP kabupaten hulu sungai selatan akan melakukan:

1. Penyempurnaan penjenjangan kinerja pada seluruh PD dengan memperhatikan kerangka berfikir logis dalam mencapai kinerja, sehingga hubungan antar level jabatan kinerja dapat sepenuhnya terkait antara satu dengan yang lain;
2. Penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam rangka refocusing program/kegiatan;
3. Penyempurnaan pada aplikasi e sakip dengan memasukkan rencana aksi sebagai bahan monitoring dan evaluasi seluruh PD dalam pengukuran kinerja. Serta Menyusun pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
4. Peningkatan kualitas laporan kinerja/LPPD dengan menyajikan informasi mengenai analisis strategi dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam menyempurnakan atau meningkatkan kinerja kedepannya. Selain itu, perlu meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta seluruh PD untuk menyampaikan dokumen laporan Kinerja/LPPD secara tepat waktu dan dipublikasikan pada website Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
5. Merekomendasikan APIP/Inspektorat untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan meningkatkan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal sehingga memberikan rekomendasi yang signifikan memacu perbaikan akuntabilitas kinerja internal sebagai salah satu dasar dalam pemberian *reward and punishment* kepada PD



Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Predikat AKIP didukung oleh program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran : Predikat AKIP

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal BB	100	100	100	672.983.700	490.624.066	72,90
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	100	100	100	1.303.820.200	1.140.774.700	87,49
	LPPD disampaikan tepat waktu	100	100	100			
	LPPD sesuai standar	100	100	100			
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan inspektorat Kab. HSS	100	100	100	1.177.682.500	1.058.372.500	89,87
	Persentase penurunan temuan eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah	100	100	100			
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat dalam periode tertentu	100	100	100			
	Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal yang ditindaklanjuti dalam periode tertentu	100	93,02	93,02			
4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	100	100	100	1.154.339.100	940.542.931	81,48



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pelayanan	100	70	70	18.118.129.547	16.375.498.154	90,38

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)	A (4,54)	100,67

Pada indikator kinerja sasaran Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) dari target A (4,51), terealisasi A (4,54), yang berarti **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 100,67%.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Nomor B/567/PP.02/2022 Tanggal 22 Desember 2022 Hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, telah dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap 2 (dua) Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Aspek dalam Evaluasi Pelayanan Publik meliputi : Kebijakan Pelayanan; Profesionalisme SDM; Sarana dan Prasarana; Sistem Informasi Pelayanan Publik; Konsultasi dan Pengaduan; Inovasi serta tindak lanjut hasil rekomendasi tahun 2022.

Berikut hasil Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara	Nilai Indeks	Kategori
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	4,6	A (Sangat Baik)
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,47	A- (Sangat Baik)
<b>Nilai Rata-Rata Pemerintah Daerah</b>		<b>4,54</b>	<b>A (Sangat Baik)</b>

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) didukung oleh program sebagai berikut:



Indikator Kinerja Sasaran : Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal BB	100	100	100	672.983.700	490.624.066	72,90
2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan Pemenuhan aspek Pelayanan Publik (Aspek)	6	6	100	1.084.881.836	995.391.546	91,75
	Persentase usaha risiko tinggi yang berizin	100	100	100			
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jumlah pengguna layanan Perizinan dan Non Perizinan telah memenuhi kewajiban pajak	100	100	100	31.894.400	25.750.000	80,74
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemenuhan pemberian Insentif dan kemudahan berusaha Penanaman Modal	100	100	100	419.973.300	390.574.678	93,00
	Persentase Regulasi Penanaman Modal/ Investasi yang selaras dengan UUCK	100	100	100			
5. Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepala Keluarga yg memiliki KK	100	97	97	226.844.600	222.901.200	98,26
	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	100	98	98			
6. Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	100	98	98	133.602.000	132.769.000	99,38
	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian	100	100	100			
7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	4,25	4,47	105,17	139.171.000	112.461.000	80,81
	Predikat Zona Integritas	75	60	80			



**SASARAN 17: MENINGKATNYA KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA BIROKRASI**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 17 pada **Tujuan V : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Kualitas Aspek Perencanaan	65,45	127	194,04
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100
Indeks Profesionalisme ASN	78,12	59,75	76,48
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>123,51</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi adalah **Sangat Baik/Tinggi** atau tercapai 123,51%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Kualitas Aspek Perencanaan	56,81	62,95	62,95	95	127	65,45	67,09
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Profesionalisme ASN	49,04	54,48	54,98	55,34	59,75	78,12	81,33

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Kualitas Aspek Perencanaan	65,45	127	194,04

Pada indikator kinerja sasaran Kualitas Aspek Perencanaan dari target 65,45, terealisasi 127, yang berarti Tercapai sebesar 194,04%.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kualitas Aspek Perencanaan didukung oleh program-program sebagai berikut:



Indikator Kinerja Sasaran : Kualitas Aspek Perencanaan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Aspek Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	95	127	133,68	1.113.603.150	964.335.716	86,60
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian sektor unggulan daerah	95	96,72	101,81	120.732.500	117.072.500	96,97
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,9864	2,9864	100	322.077.350	319.400.450	99,17
	Policy Brief yang memberikan dampak terhadap Daya saing daerah	100	100	100			

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Opini Audit Eksternal dari BPK pada tahun 2022 telah tercapai, dari target penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana realisasi di tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan penilaian dari hasil audit BPK RI dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK R.I telah melakukan audit dan hasilnya disampaikan pada Tanggal 13 Mei 2022 dengan predikat Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022	Target RPJMD	
						2022	2023
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Opini Audit Eksternal di tahun 2022 mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mana capaian Tahun 2022 ini adalah dalam mempertahankan



opini yang sudah diraih sejak tahun 2014. Capaian opini WTP pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ke tujuh ditetapkan oleh audit BPK dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Keberhasilan ini tak lepas dari faktor pendukung seperti halnya :

- a. Laporan keuangan yang semakin baik dan tepat waktu dari semua SKPD.
- b. Pembinaan dan pengawasan dari inspektorat kabupaten hulu sungai selatan yang lebih optimal, serta
- c. Terlaksananya SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah) yang lebih baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu melalui:

Indikator Kinerja Sasaran : Opini WTP BPK terhadap LKPD

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian Program dan Kegiatan KUA PPAS terhadap RKPD	100	100	100	206.808.567.119	194.676.889.936	94,13
	Ketepatan Waktu proses Penyusunan dokumen RAPBD sesuai standar yang berlaku	100	100	100			
	Persentase waktu Penyelesaian SP2D yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	100	100			
	Persentase Laporan Keuangan Pemda yang disusun tepat waktu dan isinya sesuai ketentuan yang berlaku	100	100	100			
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai standar dan Ketentuan	100	92,67	92,67	1.767.990.550	766.692.360	43,37
3. Program Pengelolaan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100	80,61	80,61	1.235.067.000	986.522.800	79,88





Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Pendapatan Daerah	Persentase jenis Pajak Daerah yang menerapkan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah	81,82	100,89	123,31			
	Persentase piutang pajak yang berhasil tertagih	100	99,41	99,41			
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan inspektorat Kab. HSS	100	100	100	1.177.682.500	1.058.372.500	89,87
	Persentase penurunan temuan eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah	100	100	100			
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat dalam periode tertentu	100	100	100			
	Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal yang ditindaklanjuti dalam periode tertentu	100	93,02	93,02			
5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	100	100	100	1.154.339.100	940.542.931	81,48

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Indeks Profesionalisme ASN	78,12	59,75	76,48

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian Indeks profesionalisme ASN pada tahun 2022 belum dapat mencapai target yang diinginkan, dari target 78,12 Indeks profesionalisme ASN dimana realisasi di tahun 2022 hanya sebesar 59,75 atau tercapai 76,48% dengan kategori Baik/Tinggi.



Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu cara mengukur profesionalisme ASN. Pengukuran dihitung dari data-data kualifikasi pendidikan, kompetensi, sasaran kerja pegawai (SKP) dan disiplin PNS.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menargetkan Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 sebesar 78,12% dengan melaksanakan teknik pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah, Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier Aparatur dan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu melalui :

Indikator Kinerja Sasaran : Indeks profesionalisme ASN

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Kepegawaian Daerah	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar	100	100	100	2.630.836.150	1.705.252.964	64,82
	Presentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya	100	100	100			
	Persentase pengisian JPT melalui seleksi terbuka	100	60	60			
	Presentase regulasi pelaksanaan Merit Sistem yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku	100	100	100			
	Persentase pengisian JPT dan Jabatan Administrator dari hasil assesment	8,26	8,26	100			
	Persentase ASN yang nilai SKP-nya berkriteria baik	100	99,83	99,83			



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Persentase SKP yang mendukung kinerja organisasi	100	100	100			
	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat	100	99,96	99,96			
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Fungsional	67,57	63,32	93,71			
	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Manajerial	91,22	90,84	99,58			
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal BB	100	100	100	672.983.700	490.624.066	72,90

**SASARAN 18: MENINGKATNYA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAERAH**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 18 pada **Tujuan V : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	92,11	92,30	100
Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	31,25	31,25	100
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>100</b>



Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah adalah **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 100%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	7,89	21,05	60,53	65,79	92,30	92,11	100
Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	0,60	9,03	15,97	23,61	31,25	31,25	38,88

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	92,11	92,30	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik pada tahun 2022 telah tercapai, dari target 92,11% perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik dimana terealisasi 92,30% di tahun 2022, atau Tercapai 100%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu melalui:

Indikator Kinerja Sasaran: Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Aplikasi Informatika	Persentase tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang mencapai level 3 (transaksi)	89	89	100	4.472.892.312	4.193.252.260	93,75



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Persentase pelayanan publik berbasis elektronik yang mencapai level 3 (transaksi)	83	83	100			
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi publik Pemerintah Kab.HSS yang terpublikasikan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial dengan cepat, akurat dan mudah diakses	100	100	100	4.315.656.160	4.176.392.790	96,77
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persentase ketersediaan data sektoral sesuai SDI persentase ketersediaan data sektoral sesuai SDI	100	100	100	93.649.000	85.755.438	91,57

**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	31,25	31,25	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan pada tahun 2022 telah tercapai, dari target 31,25% perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik dimana terealisasi 31,25% di tahun 2022, atau Tercapai dengan 100%.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit.

Pengukuran terhadap pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan dilakukan secara mandiri oleh Dinas



Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ke Desa-Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka wajah dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari kualitas pelayanan di Desa selaku lembaga pemerintah pada level paling bawah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan pemerintah desa sampai dengan tahun 2022 terdapat 23 Desa dari 144 desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerapkan penggunaan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu melalui aplikasi berbasis komputer yaitu :

1. Desa Muning Baru
2. Desa Bamban Utara
3. Desa Bamban
4. Desa Banjarbaru
5. Desa Pihanin Raya
6. Desa Gambah Luar Muka
7. Desa Tibung Raya
8. Desa Kapuh
9. Desa Amawang Kanan
10. Desa Sungai Paring
11. Desa Amawang Kiri
12. Desa Sungai Kupang
13. Desa Telaga Langsung
14. Desa Samuda
15. Desa Pandan Sari
16. Desa Tambangan
17. Desa Murung Raya
18. Desa Paramaian
19. Desa Banua Hanyar
20. Desa Bakarung
21. Desa Baluti
22. Desa Simpur
23. Desa Amawang Kiri Muka
24. Desa Teluk Haur
25. Desa Tawia
26. Desa Pandulangan
27. Desa Pantai Ulin
28. Desa Baruh Jaya



29. Desa Balah Paikat
30. Desa Hamalau
31. Desa Tambak Bitin
32. Desa Hamayung Utara
33. Desa Hakurung
34. Desa Muning Tengah
35. Desa Malutu
36. Desa Batang Kulur Kiri
37. Desa Tumingki
38. Desa Wasah Hulu
39. Desa Balanti
40. Desa Lokbinuang
41. Desa telaga Sili-sili
42. Desa Pandan Sari
43. Desa Pandak Daun
44. Desa Bajayau Tengah
45. Desa Gambah Luar

Cara pengukuran Realisasi Capaian indikator Kinerja Sasaran Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	$\frac{\sum \text{Desa yang menggunakan aplikasi TI}}{\sum \text{Desa Se - Kab. HSS}} \times 100$	$\frac{45 \times 100}{144} = 31,25$

Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan	13	23	34	45
Jlh Desa se Kab.HSS	144	144	144	144
Persentase	9,03%	15,97%	23,61%	31,25%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. HSS Tahun 2022



Pada tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah desa yang menggunakan IT cukup baik, dengan penambahan sebanyak 11 Desa dari kondisi tahun 2020 dan 11 Desa dari kondisi tahun 2021.

Meskipun Jumlah Desa yang menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih banyak desa yang belum menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kondisi yang menyebabkan pencapaiannya lambat, antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Lemahnya SDM Perangkat Desa dalam penggunaan IT;
- b. Jaringan internet yang belum menjangkau seluruh desa; dan
- c. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan.

Adapun upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan penggunaan IT pelayanan di Desa antara lain :

- a. Penyediaan sarana prasarana pelayanan dan jaringan internet yang memadai di Kantor Desa menggunakan anggaran keuangan Desa;
- b. Melakukan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan pembinaan;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Desa dalam pengelolaan pelayanan di desa; dan
- d. Memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi ke desa.

Adapun program di Dinas PMD untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu melalui Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja program yaitu persentase pemerintah desa/kelurahan yang berkinerja baik. Kriteria Pemerintah Desa berkinerja baik yaitu :

- a. Melaksanakan administrasi Desa dengan tertib;
- b. Memiliki perencanaan keuangan dan pembangunan desa yang baik;
- c. Pelaporan keuangan desa yang akuntabel; dan
- d. Pelaporan Penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu.

Upaya meningkatkan persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan disamping melalui pelaksanaan program yang ada pada Dinas PMD juga didukung oleh kegiatan yang dianggarkan pada APBDDes, antara lain melalui penyediaan sarana prasarana konektivitas internet.

Secara rinci Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu melalui :





Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kesesuaian RKPDes Terhadap RPJMDes	100	100	100	328.726.600	287.592.450	87,49
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Sehat Sejahtera	60,42	60,42	100	716.628.700	623.390.994	86,99
	Persentase Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi	60,42	60,42	100			

**SASARAN 19: MENINGKATNYA KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 19 pada **Tujuan V : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Persentase peningkatan penerimaan zakat	11,00	12,24	111,27
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>111,27</b>

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan adalah **Sangat Baik/Tinggi** atau Tercapai sebesar 111,27%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Persentase peningkatan penerimaan zakat	7,5	43,87	44,76	17,95	12,24	11,00	12,00



**Analisa capaian Indikator Kinerja Sasaran :**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
Persentase peningkatan penerimaan zakat	11,00	12,24	111,27

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Persentase peningkatan penerimaan zakat pada tahun 2022 **Sangat Baik/Tinggi**, dari target 11,00% Persentase peningkatan penerimaan zakat dimana terealisasi 12,24% di tahun 2022, atau Tercapai sebesar 111,27%.

Tabel  
Penerimaan Zakat Tahun 2019-2022  
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun	Penerimaan Zakat (Rp)
2019	2.336.005.324
2020	3.381.609.432
2021	3.988.690.324
2022	4.476.842.099

Sumber: Bagian Kesra Setda Kab. Hulu Sungai Selatan

Indikator ini dicanangkan sebagai salah satu parameter dalam kehidupan sosial keagamaan. Dengan peningkatan penerimaan zakat yang terus meningkat bisa menjadi salah satu tanda bahwa ada kepatuhan dalam pembayaran zakat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Cara pengukuran Realisasi Capaian indikator Kinerja Sasaran Persentase peningkatan penerimaan zakat sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Penerimaan Zakat Th 2022} - \sum \text{Penerimaan Zakat Th 2021}}{\sum \text{Penerimaan Zakat Th 2021}} \times 100$$

$$\frac{4.476.842.099 - 3.988.690.324}{3.988.690.324} \times 100 = 12,24\%$$

Untuk periode tahun anggaran 2022 realisasi capaian indikator penerimaan zakat mengalami kenaikan dimana realisasi capaian peningkatan penerimaan zakat mencapai 12,24% dibandingkan target sebesar 11,00%.



Secara rinci Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu melalui :

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase peningkatan penerimaan zakat

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	100	100	10.745.713.500	9.820.704.000	91,39

#### A. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara rinci akan dijabarkan melalui tabel dibawah ini.



**REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN DAN YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI**

Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	12,40	Program Pengelolaan Pendidikan	62.637.310.615	59.595.839.578	95,14
		2	Rata-rata lama sekolah	7,79	Program Pembinaan Perpustakaan	293.041.850	284.593.650	97,12
		3	Persentase PAUD formal terakreditasi A	1,88				
		4	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	13,98				
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5	Angka Harapan Hidup	66,51	Program Pemenuhan Upayan kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81.362.533.390	76.097.156.052	93,53
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.331.261.875	6.918.111.738	74,14
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	15.184.900	13.820.500	91,01
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	360.027.400	321.869.150	89,40
		6	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	70,92	Program Pengendalian Penduduk	1.255.708.800	1.231.130.536	98,04
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.959.930.275	1.933.284.350	98,64
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.850.355.100	1.473.362.173	79,63



Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
		7	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA (87,40)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	184.681.555.935	149.578.546.050	80,99
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	448.800.000	277.360.000	61,80
		8	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	11,54	Program Pemenuhan Upayan kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81.362.533.390	76.097.156.052	93,53
3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	9	PPH Ketersediaan	87,54	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.175.000.000	2.174.574.000	99,98
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.081.727.550	1.898.712.444	91,21
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	30.389.900	30.194.900	99,36
4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	10	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	95,80	Program Pengelolaan Pendidikan	62.637.310.615	59.595.839.578	95,14
					Program Pemenuhan Upayan kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81.362.533.390	76.097.156.052	93,53
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.917.191.036	11.863.659.705	99,55
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.008.749.000	10.973.683.040	99,68



Misi I : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11	Persentase angka PMKS yang mandiri	56,77	Program Rehabilitasi Sosial	7.553.729.700	6.158.242.200	81,53



Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	12	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4,54	Program Pemberdayaan Sosial	4.925.289.150	4.792.701.163	97,31
		13	Indeks Gini	0,260	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	13.688.146.400	13.264.250.800	96,90
					Program Penanganan Bencana	508.120.000	460.786.000	90,68
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	248.188.000	229.700.400	92,55
7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14	Tingkat pengangguran terbuka	2,29	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	262.019.700	246.483.060	94,07
					Program Penempatan Tenaga Kerja	30.235.100	29.084.850	96,20
					Program Hubungan Industrial	34.319.750	22.033.000	64,20
8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	15	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	5,59	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.690.212.120	1.342.093.137	79,40
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	32.475.925	0	0
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.239.800	0	0
		16	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,40	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	29.791.000	20.223.350	67,88
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.090.894.200	5.850.212.546	96,05
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	546.629.100	371.964.332	68,05
					Program Pengembangan Ekspor	630.925.000	539.683.286	85,54



Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	39.165.950	33.395.500	85,27
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	15.368.000	9.700.000	63,12
	17 Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,40	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.736.905.650	1.644.973.775	94,71
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.854.734.250	8.499.500.669	86,25
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	336.126.950	318.755.500	94,83
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	415.050.966	375.202.370	90,40
			Program Perizinan Usaha Pertanian	241.707.400	145.768.750	60,31
			Program Penyuluhan Pertanian	643.379.600	364.942.900	56,72
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.336.804.800	893.443.568	66,83
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.041.963.737	1.006.821.169	96,63
			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	672.664.700	647.551.532	96,27





Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	34.194.183	29.952.000	87,59
		18	Persentase koperasi sehat	18,40	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	456.682.200	436.741.200	95,63
					Program Pengembangan UMKM	398.305.400	378.036.046	94,91
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	23,89	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.235.067.000	986.522.800	79,88
10	Meningkatnya investasi PMDN	20	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	7,94	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.084.881.836	995.391.546	91,75
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	31.894.400	25.750.000	80,74
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	419.973.300	390.574.678	93,00
11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	21	Tingkat Pengeluaran Wisatawan ( <i>Spending of money</i> )	8.731.030.000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.704.849.600	1.546.965.368	90,74
					Program Pemasaran Pariwisata	949.286.000	804.711.700	84,77
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	696.620.000	545.990.000	78,38
					Program Pengembangan Kebudayaan	1.766.600.000	1.735.890.000	98,26
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	788.000.000	788.000.000	100,00
					Program Pengelolaan Permuseuman	700.000.000	693.667.500	99,10



Misi III : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang Sektor Perekonomian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN		
12 Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	22 Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan $\geq 40$ Km/jam	69,58	Program Penyelenggaraan Jalan	81.238.202.380	51.505.970.062	63,40		
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.128.469.392	1.568.601.600	73,70		
			Program Pengelolaan Pelayaran	582.217.300	520.953.250	89,48		
	23 Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	70,47	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	28.468.965.958	26.898.876.437	94,48		
			24 Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	85,71	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.953.044.000	1.923.757.760	98,50
					Program Penataan Bangunan Gedung	22.603.506.000	21.219.944.961	93,88
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	650.593.650	155.253.289	23,86
	25 Persentase kecukupan RTH publik	38,06	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	5.303.631.300	4.762.112.750	89,79		
	26 Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	59,88	Program Pengembangan Perumahan	136.219.550	115.567.750	84,84		
			Program Kawasan Permukiman	2.069.352.000	2.005.649.000	96,92		
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4.138.786.000	4.037.503.923	97,55		
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	88.888.750	73.427.200	82,61		



Misi IV : Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,73	Program Peningkatan Kerjasama Desa	14.375.000	13.250.000	92,17
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	328.726.600	287.592.450	87,49
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	716.628.700	623.390.994	86,99
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.720.817.500	1.503.322.507	87,36
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	29.129.071.191	27.450.047.311	94,24
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	400.000.000	400.000.000	100,00
14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,65	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	44.004.500	42.464.900	96,50
					Program Perlindungan Perempuan	75.657.750	28.675.250	37,90
		29	Persentase desa/kelurahan layak anak	6,08	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	261.542.200	259.307.800	99,15
					Program Perlindungan Khusus Anak	420.507.200	285.449.090	67,88
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	30	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,94	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.042.306.200	959.502.622	92,06
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	576.764.800	332.384.500	57,63
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	196.427.000	90.600.000	46,12
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	47.430.000	7.242.500	15,27



Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN		
16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	31	Predikat AKIP	A (83,02)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	672.983.700	490.624.066	72,90
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.303.820.200	1.140.774.700	87,49
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.177.682.500	1.058.372.500	89,87
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.154.339.100	940.542.931	81,48
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.118.129.547	16.375.498.154	90,38
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	0	0
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.058.950.220	1.058.950.220	100,00
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	31.588.850	31.228.850	98,86



Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	82.590.000	37.850.000	45,83
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.743.914.248	2.681.680.979	97,73
	32 Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,54)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	672.983.700	490.624.066	72,90
			Program Pelayanan Penanaman Modal	1.084.881.836	995.391.546	91,75
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	31.894.400	25.750.000	80,74
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	419.973.300	390.574.678	93,00
			Program Pendaftaran Penduduk	226.844.600	222.901.200	98,26
			Program Pencatatan Sipil	133.602.000	132.769.000	99,38
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	139.171.000	112.461.000	80,81
			Program Pengelolaan Arsip	115.303.950	105.485.250	91,48
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.177.682.500	1.058.372.500	89,87
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.154.339.100	940.542.931	81,48



Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN		
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.670.524.650	20.341.936.021	89,73		
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	856.907.100	789.814.555	92,17		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.426.152.690	22.375.973.349	84,67		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.427.242.600	2.069.779.635	85,27		
					Program Perekonomian dan Pembangunan	555.845.550	512.638.268	92,23		
					Program Perekonomian dan Pembangunan	278.927.650	240.516.300	86,23		
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.303.820.200	1.140.774.700	87,49		
		33	Kualitas aspek perencanaan	95,00	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.113.603.150	964.335.716	86,60		
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	120.732.500	117.072.500	96,97		
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	322.077.350	319.400.450	99,17		
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.429.073.400	736.451.036	51,53		
		17	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	34	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	206.808.567.119	194.676.889.936	94,13
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.767.990.550	766.692.360	43,37



Misi V : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2022	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.235.067.000	986.522.800	79,88
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.177.682.500	1.058.372.500	89,87
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.154.339.100	940.542.931	81,48
		35	Indeks Profesionalisme ASN	78,85	Program Kepegawaian Daerah	2.630.836.150	1.705.252.964	64,82
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.287.340.450	3.705.513.540	86,43
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	672.983.700	490.624.066	72,90
18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	92,30	Program Aplikasi Informatika	4.472.892.312	4.193.252.260	93,75
					Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.315.656.160	4.176.392.790	96,77
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	93.649.000	85.755.438	91,57
		37	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	31,25	Program Administrasi Pemerintahan Desa	328.726.600	287.592.450	87,49
					Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	716.628.700	623.390.994	86,99
19	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	38	Persentase peningkatan penerimaan zakat	12,24	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10.745.713.500	9.820.704.000	91,39